



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IV DPR RI DENGAN SEKJEN, DIRJEN PERKEBUNAN, DIRJEN
HORTIKULTURA, DIRJEN PETERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN
DAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III (tiga)
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 April 2020
Waktu	: 10.10 s.d. 14.25 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (Rapat Secara Virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: <i>Refocussing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 46 orang 55 Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 7 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Drs. I Made Urip, M.Si. 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 5. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 6. Maria Lestari, S.Pd. 7. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
3 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
 2. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 3. Alien Mus
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
4 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 2. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 3. Ir. Sumail Abdullah
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess, M.Sc,
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
 2. H. Sulaeman L. Hamzah
 3. H. Charles Meikyansah.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
1 dari 6 orang Anggota
 1. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
 4. Muslim, S.HI., M.M.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 2. Slamet Riyadi, S.Psi
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
 2. Ema Ummiyatul Chusnah.

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
4. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian); dan
5. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamuallaikum warrahmatullahiwabarokatuh*
Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat saudara Sekretaris Jenderal, Dirjen Perkebunan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian beserta jajaran.
Serta Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi bapak dan ibu yang menjalankannya dan semoga kita selalu dalam lindungannya.

Sesuai dengan jadwal rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang III tahun sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi BAMUS tanggal 27 Maret 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 31 Maret 2020, pada hari ini selasa tanggal 28 April 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang merupakan tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran

Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan pasal ... dan pasal 251 ayat 1 peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Dengar Pendapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10:10 WIB)

Rapat Dengar Pendapat pagi ini kita mulai pukul 10.10 dan diakhiri pukul 14.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Eselon I Kementerian Pertanian;
5. Kesimpulan;
6. Penutup.

Apakah acara rapat ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Dengar Pendapat ini merupakan rangkaian dari pembahasan dengan Eselon I Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 16 April 2020 mengenai Refocusing kegiatan dan Realokasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan.

Sebelum Rapat hari ini dimulai, Komisi IV DPR RI hendak mengingatkan mengenai satu poin kesimpulan di mana Kementerian diminta untuk menghitung kembali, saya tegaskan menghitung kembali sesuai dengan hasil pembahasan pada Rapat Kerja yang lalu. Jadi saya berharap jangan menyimpang dari kesimpulan Rapat Kerja yang lalu, di mana hasil refocusing dan realokasi digunakan untuk meningkatkan volume pada program prioritas *existing* yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan bersentuhan langsung dengan petani. Komisi IV DPR RI juga meminta agar semua kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan rapat-rapat, perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri, pembangunan fisik kantor yang tidak terlalu mendesak, beserta kegiatan yang tidak prioritas atau kurang mendukung sasaran program dialihkan anggarannya untuk kepentingan produksi. Eselon I kementerian pertanian dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran harus mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dalam kesimpulan Rapat Kerja tanggal 16 April yang lalu.

Para Eselon I tidak boleh mengambil kebijakan sendiri sehingga keluar dari ruang ramu yang telah kita sepakati bersama. hal lain yang menjadi perhatian Komisi IV DPR RI adalah refocusing kegiatan dan realokasi

anggaran jangan berupa kegiatan yang baru, karena yang lalu pernah disisipkan anggaran yang tidak jelas yang tidak ada Dipanya dimasukkan. Selain itu refocusing kegiatan dan realokasi anggaran juga harus memperhatikan upaya pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak COVID-19, khususnya upaya pemulihan ekonomi pasca, saya tegaskan lagi pasca pandemi COVID-19.

Komisi IV DPR RI berharap pembahasan mengenai Refocusing kegiatan dan Realokasi anggaran ini dapat segera selesai dan segera ditindak lanjuti sehingga masyarakat pertanian dapat mengambil manfaat positif dari hasil Refocusing kegiatan dan Realokasi anggaran ini. Pada rapat hari ini kita bersama-sama melakukan penyisiran dan pendalaman terhadap kegiatan dan anggaran dari masing-masing Eselon I, sehingga diharapkan dapat terlihat program prioritas yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan konsisten dan kebijaksanaan termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB secara mendetail untuk dapat diputuskan secara bersama.

Demikian pengantar Rapat ini kami sampaikan, selanjutnya kami persilahkan Eselon I Kementerian Pertanian menyampaikan penjelasannya, terima kasih.

Silahkan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Terima kasih,

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamuallaikum Warrahmatullahiwabarokatuh.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran *Allah SWT* atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan Rapat Dengar Pendapat *Insha Allah* semuanya dalam keadaan sehat wall'afiat. Pada kesempata yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan selamat melaksanakan Ibadah Puasa bagi bapak ibu yang puasa, semoga puasa kita *Insha Allah* diterima oleh *Allah SWT*.

Bapak Ibu sekalian mengawali rapat pada hari ini perkenalkan kami, sesuai undangan Komisi IV DPR RI ada empat Eselon I yang diawali dengan Direktur Jenderal Perkebunan, kemudian Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan untuk menyampaikan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran masing-masing Eselon I yang tentunya sesuai dengan tindak lanjut raker tanggal 16 April 2020. Untuk mempersingkat waktu ijinakan, dimulai dari Direktur Jenderal Perkebunan untuk menyampaikan penjelasannya.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Sekjen,

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamuallaikum warrahmatullahirahmatullahiwabarokatuh,
Selamat pagi,
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati para wakil ketua Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati para anggota Komisi IV DPR RI, dan
Teman-teman sekalian Pejabat Eselon I yang berkesempatan hadir pada RDP ini.

Bapak Ketua, Bapak/Ibu Wakil Ketua, dan hadirin sekalian.

Ijinkan kami melaporkan terkait dengan hasil refocusing Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun anggaran 2020, sebagai berikut.

Bapak ketua, dan bapak, ibu sekalian yang saya hormati.

Dari semula anggaran kami di Direktorat Jenderal Perkebunan Rp1,5 Triliun setelah refocusing menjadi Rp812 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Kami laporkan bapak ketua dan bapak ibu sekalian, kami memfokuskan berkait apa yang menjadi arahan bapak ketua dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI sebagai hasil dari pada Rapat Kerja di beberapa hari yang lalu. Maka kami memfokuskan pada produktivitas yang kami fokuskan pada membangun logistik benih di Direktorat Jenderal Perkebunan. Karena beberapa perubahan nanti secara detail kami akan satu persatu sampaikan.

Dari logistik benih bapak ketua dan bapak, ibu sekalian kami laporkan yang kegiatan pertama ini adalah membangun dan memelihara kebun sumber benih sebagai bagian untuk memperkuat perbenihan kita, Kemudian yang kedua diawal tadi kita memprogramkan *Nursery* pak ketua dan bapak ibu sekalian, di dalam konteks pereplikasi benih dalam jumlah cukup besar maka sesungguhnya awalnya kami memfokuskan untuk membangun *Nursery* tetapi karena adanya pemotongan dan penghematan ini lantas kami nanti akan melaporkan, bisa kita undang tapi kita masih tetap agar fokus penyediaan dan produksi benihnya, di poin C itu dan ini komoditas, bapak ketua dan bapak, ibu sekalian cukup banyak tetapi dari proporsi dan jumlah volumenya kami laporkan, sebagai berikut, dari misalnya dari penyediaan benih 49 juta batang

yang semula dianggarkan menjadi 21 juta batang kalau ini kita telusuri memang kami fokus pada beberapa komoditas, kopi, kakao, karet, kelapa, pala, cengkeh dan beberapa komoditas strategis lainnya.

Bapak ketua dan Bapak, ibu sekalian yang kami hormati,

Dari proporsi perubahan ini jumlah anggaran yang kami alokasikan untuk logistik benih Rp728 Miliar menjadi Rp555 Miliar masih menduduki proporsi yang pertama dalam konteks meningkatkan produktivitas pangan dari subsektor perkebunan, Kemudian yang kedua, poinnya adalah pengembangan kawasan jadi benih yang kita produksi, bapak ketua dan bapak, ibu sekalian kami kaitkan dengan pengembangan kawasan yang sudah kita set yang berbasis korporasi dari semula Rp252 Miliar berubah menjadi Rp147 Miliar dengan komposisi seperti yang ada di dalam paparan ini, seperti misalnya kopi 14.000 hektar kami alokasikan 6.400 hektar. Kemudian karena ada fokus yang berkait dengan rempah juga misalnya pala, kita sudah lama tidak mengembangkan ini, kami juga memberikan satu proporsi cukup besar didalam pala ini dengan sedikit mengurangi dari 18.000 menjadi 13.000, demikian seterusnya untuk komoditas-komoditas strategis lainnya bapak ketua dan bapak ibu sekalian Anggota Komisi IV DPR RI.

Komponen kegiatan kami yang ketiga, itu berkait dengan kegiatan pasca panen dan pengolahan untuk memperkuat hilirisasi, dan sekaligus bahwa pemasaran berkait juga nanti dengan ekspor komoditas strategis kita meskipun APBN ini hanya untuk memfasilitasi berbagai eksportir yang bergerak di komoditas-komoditas strategis perkebunan. Dari 445 unit volumenya di awal berubah menjadi 138 unit dengan nilai Rp55 Miliar. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan peningkatan penanganan OPT juga dengan gangguan perkebunan terkait dengan kebakaran dan sebagainya Bapak ketua kami melaporkan ada perubahan 50% berkurang dari 4000 menjadi 2000 hektar tentu apa yang akan kami lakukan berkait dengan ini fokus kepada beberapa kegiatan yang berkait dengan OPT dan gangguan kebakaran kita.

Selanjutnya berkait dengan ... pertanian organik, bapak ketua dan bapak ibu sekalian, yang berbasis komoditas perkebunan strategis yang semula 69 Desa kami mengalokasikan setelah refocusing 35 Desa, yang ini anggarannya dari Rp13 Miliar menjadi Rp5 Miliar bapak ketua. Kemudian yang berkaitan dengan data dan juga sistem informasi sebagai pendukung komunikasi serta validasi dari pada data perkebunan kami ada refocusing dari Rp93,2 Miliar menjadi Rp79 Miliar. Yang berkait dengan COVID-19 bapak ketua, dan bapak ibu sekalian...

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen...

Tolong diperhatikan pengembangan basis data dan juga kegiatan sistem informasi dan lain-lain ini. Untuk apa dengan 79 Miliar ini?

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Bapak Ketua dan Bapak, Ibu sekalian,

Sebenarnya disitu tidak saja berkait dengan basis data saja, karena kita ingin pak ketua, seperti Misalnya data ini berkait dengan kakao, berkait dengan sawit, bapak ketua kami perlu mengkomunikasikan dengan daerah secara lebih cepat dalam menggunakan sistem bapak ketua, Kemudian juga..

KETUA RAPAT:

Saya tanya dahulu pak dirjen, Sebarapa pentingnya program ini, dalam situasi COVID-19?

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Baik bapak ketua nanti kami catat..

KETUA RAPAT:

Ya, Lanjutkan..

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Ijin untuk melanjutkan Bapak ketua, dan bapak, ibu sekalian.

Poin nomor tujuh, khususnya yang berkaitan dengan COVID-19 ada juga kita mengeluarkan anggaran untuk satu kegiatan Rp3,4 Miliar untuk pembelian bahan pangan, obat-obat, peralatan medis sebagai bagian tanggap COVID-19 untuk pegawai, pekebun, dan tentunya untuk masyarakat disekeliling kebun.

Yang Kedelapan padat karya bapak ketua kami laporkan, kita mengalokasikan setelah refocusing yaitu Rp11,9 Miliar dan ini berkait dengan padat karya tunai dan termasuk yang kaitannya dengan nanti bantuan-bantuan benih untuk meningkatkan dari pada intensifikasi, dan ... yang pasca phk misalnya, kita bisa memberikan bantuan benih untuk bisa di tanam yang semula mereka belum melakukan itu, termasuk ada disitu. Kemudian perkembangan Kelapa Genjah bapak ketua, ini kami fokuskan di pekarangan sesungguhnya untuk juga memfasilitasi karena posisi saat ini adalah banyak bekerja di rumah, kelapa ini kita fokuskan di pekarangan Bapak ketua dan bapak, ibu para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan, itu Rp16,5 Miliar ini nanti kami pilih yang varietasnya unggul memang untuk saat ini hanya 150 ribu batang. Nanti tentu dalam proses pengembangannya tahun depan kita bisa lanjutkan.

Kemudian nomor sepuluh berkait dengan fasilitasi operasi pasar dan koordinasi Ekspor itu Rp4,8 Miliar mohon maaf tadi untuk Kelapa Genjah itu Rp16,5 Miliar. Selanjutnya perkembangan dan sertifikasi dalam konteks kita perbenihan bapak ketua, wujudnya pelayanan bapak ketua ini sebagian besar

ada belanja mengikat di balai besar kami bapak ketua, ada sertifikasi perbenihan di balai besar kami ada tiga, di medan, surabaya, dan ambon, itu anggarannya sebesar Rp108 Miliar kami kurangi dari semula Rp125 Miliar. Yang lain berkait dengan belanja pegawai mengikat lainnya bapak ketua, ini sehingga dari total Rp1,05 Triliun menjadi Rp812 Miliar.

Kami lanjutkan bapak ketua, bapak, ibu sekalian yang kami hormati.

Kalau kami ... komposisi dari pembelanjannya 84% kami alokasikan untuk bantuan pemerintah artinya kita semua difokuskan untuk petani, pekebun, dan masyarakat. Belanja pegawai 12%, belanja modalnya hanya 4% totalnya Rp812,7 Miliar. Terus, ini komposisi di pusat saya ingin sampaikan bahwa kegiatan kami tentu paling besar adalah tugas kemampuan Rp455 Miliar menduduki posisi 56%, dikonsentrasi 6%, pusat 23% termasuk yang ada di balai besar bapak ketua dan bapak, ibu sekalian, dan di UPT-UPT pusat.

Saya kira ini bapak ketua yang kami lakukan didalam konteks refocusing ini, sekali lagi catatan kami dari bapak ketua tadi untuk mengevaluasi kembali yang terkait dengan sistem informasi dan validasi data.

Terima kasih,
Wassalamuallaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Selanjutnya Dirjen Hortikultura, Saya persilahkan.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik,
Bismillahirrohmanirohim,
Assalamuallaikum warrohmatullahi wabarokatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami banggakan,

Perkenalkan kami Direktorat Jenderal Hortikultura menyampaikan refocusing program dan anggaran tahun anggaran 2020. Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura ini kena refocusing yang cukup besar dari anggaran semula Rp1,082,601,627 Miliar menjadi Rp566,146,411.000,00 dengan rincian kegiatan untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat di Direktorat sayuran dan tanaman obat yang semula jadi Rp403 Miliar menjadi Rp201 Miliar, dengan rincian nanti Bapak, ibu anggota Komisi IV semua bisa melihat, jadi kawasan bawang merah berkurang dari semula 5.704 hektar

menjadi 3000 hektar, dan sayuran lainnya dari 860 hektar menjadi 130 hektar, untuk aneka cabai dari 13.328 hektar menjadi 5000 hektar, dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk kegiatan pengembangan sistem perbenihan ini, Direktorat Perbenihan jadi anggarannya dari Rp93 Miliar menjadi Rp30 Miliar yang terdiri dari kegiatan sertifikasi benih hortikultura dari 4000 unit menjadi 1000 unit, sarana dan prasarana benih dari 28 menjadi 9 Unit, untuk benih umbi dari 1,570.000 M2 menjadi 500 M2, dan untuk benih batang dari 3,786.000 menjadi 2 juta.

Untuk pengembangan perlindungan Hortikultura direktorat hortikultura juga berkurang dari 180 kelompok untuk tanaman pht menjadi 130 kelompok. Penanganan Dampak Perubahan Iklim & Bencana Alam ini tetap tidak kita potong, karena kita tahu bahwa kedepan ini perubahan iklim akan semakin kuat lokasinya bahwa ... akan melanda jadi kita tidak mengurangi penanganan dampak perubahan iklim tetap 75 hektar. Pengendalian OPT ramah lingkungan, dan sarana klinik PHT juga ada pengurangan.

Yang keempat, peningkatan Produksi buah dan Florikultura ini di Direktorat Buah dan Florikultura, kawasan buah lainnya semula 1,451 hektar menjadi 400 hektar, kawasan jeruk yang semula 500 hektar, menjadi 250 hektar, kawasan florikultura dan seterusnya, Jadi pengurangannya cukup signifikan.

Untuk kegiatan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Hortikultura, ini dari anggaran Rp86,9 miliar menjadi Rp7,9 miliar, ini kegiatannya berupa Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura dari semula 498 unit menjadi 53 Unit, Prasarana nilai tambah dari semula 152 unit menjadi 5 unit, dan seterusnya.

Untuk kegiatan, kita mengalokasikan penanganan COVID-19, jadi nomor enam yaitu pencegahan penyebaran COVID-19 melalui peningkatan daya tahan tubuh yaitu senilai Rp1,8 Miliar, penanggulangan dampak COVID-19 terhadap kerugian hasil produksi petani hortikultura ini senilai Rp1 Miliar dalam bentuk kegiatan sewa gudang, jadi kalau misalnya ada yang kesulitan melakukan penyimpanan maka kita akan alokasikan untuk sewa gudang untuk sementara tidak dijual dulu kalau memang harganya jatuh, jadi kita alokasikan senilai Rp1 Miliar rupiah.

Poin empat pemilihan bahan pangan ini juga vital untuk (suara tidak jelas) khususnya produk sayuran dan buah-buahan ini ada senilai Rp5 Miliar dan bantuan pemasaran produk hortikultura bagi petani ini dalam bentuk paket senilai Rp14 Miliar, penanggulangan dampak COVID-19 terhadap keberlanjutan usaha produksi hortikultura senilai Rp36 Miliar, Pengawasan pelaksanaan Program, Kegiatan, Pedoman dari Rp110 Miliar turun menjadi Rp45 Miliar disini ada kegiatan pengawasan program bantuan masyarakat (suara tidak jelas) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, belanja modal kita juga berkurang dari Rp14,5 Miliar menjadi 10,8 Miliar, belanja pegawai dan operasional mencakup gaji pegawai senilai Rp40 Miliar tetap menjadi Rp40

Miliar, layanan dukungan manajemen disini ada layanan (suara tidak jelas), ada pemantauan pelaporan kelola keuangan, THL, Data dan Aset, honor petugas data, petugas informasi pasar (PIP). Ini tetap kita sediakan, sebagai contoh honor Petugas keuangan, Aset, PIP (suara tidak jelas), Operasional satker seluruh Indonesia dari (101 satker) dari semula Rp25 Miliar menjadi Rp21,639 Miliar.

Nah untuk tanggap darurat COVID seperti yang kami sampaikan untuk point 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, jadi untuk pencegahan penyebaran COVID melalui peningkatan daya tahan tubuh Rp1,86 Miliar, Penanggulangan dampak COVID terhadap kelebihan hasil produksi petani hortikultura (sewa gudang penyimpanan) Rp1 Miliar, Bantuan penyediaan bahan pangan hortikultura untuk masyarakat terdampak COVID-19 Rp5 Miliar, bantuan pemasaran produk hortikultura bagi petani terdampak COVID-19 (dalam bantuan transportasi) ini kita alokasi Rp14 Miliar, Penanggulangan dampak COVID-19 terhadap keberlanjutan usaha produksi hortikultura (bantuan benih hortikultura) jadi kita alokasikan cukup besar senilai Rp36 Miliar Rupiah. Karena kita sebagai dampak COVID-19 banyak penangguran dimasyarakat kita alokasikan bantuan benih supaya masyarakat tetap bisa melaksanakan penanaman, Ini ... sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya yang siap langsung buah-buahan semusim yang siap langsung di produksi oleh masyarakat dan masyarakat langsung bisa proses menanamnya serta bisa menghasilkan ekonomi yang baik bagi masyarakat.

Demikian bapak ketua yang bisa kami paparkan dari Direktorat Jenderal Hortikultura.

Terima kasih

Wassalamuallaikum warrahmatullahiwabarokatuh

KETUA RAPAT:

Ya, Lanjut..

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Selanjutnya bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami persilahkan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik, terimakasih

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,

Para sahabat pejabat Eselon I

Assalamuallaikumwarrahmatullahi wabarokatuh

Selamat pagi, dan

Salam Sejahtera bagi kita semua

Kami mohon ijin untuk menyampaikan penghematan anggaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semula sebesar Rp2.002,3 Triliun setelah terjadi refocusing anggarannya menjadi sebesar Rp1.219,7 Triliun. Sumber-sumber penghematan kami terdiri dari:

- a. Belanja Modal,
- b. Belanja perjalanan dinas,
- c. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak,
- d. Belanja Barang lainnya

Dan itu semua jumlahnya sebesar Rp802,5 Miliar. Selanjutnya hasil Revisi Refocusing kami meliputi:

- a. Optimalisasi reproduksi semula 3.000.000 ekor, menjadi 5.836.308 dan dihemat menjadi 3.536.307 akseptor;
- b. Bantuan ternak kambing/domba : semula 2.000 ekor hasil refocusing menjadi 12.650 ekor dihemat menjadi 5.000 ekor;
- c. Bantuan ternak sapi: semula 2.400 ekor, kemudian refocusing menjadi 6.229 ekor, kemudian dihemat menjadi 3.140 ekor;
- d. Bantuan ayam lokal COVID-19: semula 0 ekor menjadi 1.000.000 ekor dihemat kemudian menjadi 800.000 ekor, untuk petani miskin (petani penggarap dan/atau buruh tani) berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMULTHAN) BPPSDMP, Kementerian pertanian;
- e. Identifikasi penyakit hewan semula 180.000 direfocusing menjadi 190.000, kemudian kami hemat menjadi 94.650 sampel;
- f. Pemberantasan penyakit hewan yang semula 5.167.450 dosis, menjadi 5.340.950, kami hemat menjadi 3.156.993 dosis;
- g. Pengembangan HPT semula 2.348 ha, menjadi 2.080 ha, kami hemat menjadi 856 Ha.

Bapak ketua yang sangat kami muliakan, Hasil Refocusing dan Penghematan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi,

1. Hijauan Pakan ternak,
2. Pakan olahan dan bahan pakan ...

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen,

coba tolong dijelaskan nomor dua apa itu..

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Pakan olahan ini dan bahan pakan ini ...

KETUA RAPAT:

Itu diadakan oleh swasta? Bantuan untuk siapa, cukup besar nilainya itu..

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Nanti bantuan itu kami bantukan ke Masyarakat yang antara ayam dan pakan itu.

KETUA RAPAT:

Saya minta itu di evaluasi dulu nanti, ya lanjutkan..

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Baik..

Kemudian pencegahan dan pengamanan penyakit hewan baik itu yang semula 5juta sekian dosis kami refocusing menjadi 3 juta 156. Dan selanjutnya untuk obat dan bahan *biologic* ini terkait dengan pemeriksaan pemeriksaan yang ada di UPT-UPT kita. Kemudian Tenaga Harial Lepas (THL) ada 1.026 orang ini tetap, karena ini terkait dengan THL. Kemudian optimalisasi reproduksi kami refocusing kemudian kami hemat menjadi 3.536.03 sektor ini terkait dengan ... yang ada .. pada sapi dan kerbau. Kemudian kami untuk benih ternak unggul ini terkait dengan Sperma dari 4.940.000 tetap 4.940.000, kemudian pengembangan ternak Ruminansia potong dari 5000 ekor menjadi 8140 ekor, kemudian untuk sapi potong 2400 menjadi 3140 ini untuk ternak lokal, kemudian kambing dan domba dari 2000 menjadi 5000, kerbau dari 600 kami terpaksa hilangkan ini kerbaunya karena untuk memenuhi kambing dan domba kami prioritaskan.

Kemudian untuk pengembangan ternak ruminansia pera kami hilangkan karena ini berkaitan dengan impor sapi pera, karena harga jualnya tidak terkendali naik turun, kami sulit sekali Kemudian pengembangan unggas dan aneka ternak..

KETUA RAPAT:

Bapak dirjen, nomor 15 ini apa? pengembangan Unggas lokal dan aneka ternak, tadi sudah ada unggas, sudah ada kambing, sudah sapi, sudah domba. Sudah segala macam, ini apa?. Supaya semua anggota tahu.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Ini teruntuk unggas lokal itu, yang ada di UPT perbibitan kita..

Mohon ijin pak ketua, pengembangan unggas lokal adalah pengembangan yang ada di UPT perbibitan kita..

KETUA RAPAT:

Suaranya tidak jelas pak dirjen, anggota sulit mendengar penjelasannya, Maskernya kalau bisa dibuka...

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Terima kasih pak ketua mohon ijin, untuk pengembangan unggas lokal dan aneka ternak ini kami prioritaskan di 9 UPT perbibitan kita, dan di UPT-UPT yang ada di Provinsi, Demikian penjelasan kami pak ketua.

Kemudian ayam lokal,

- a. Kemudian ada babi juga ini terpaksa kami naikan untuk di daerah-daerah yang non muslim,
- b. Kemudian bantuan budidaya ayam lokal, dan
- c. pedaging antisipasi dampak Covid yang semula tidak ada menjadi ada sebanyak 800.000 ekor.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen mohon diperhatikan lagi nomor 15 yang A itu ayam lokal senilai Rp26 Miliar, kemudian yang C bantuan budidaya Ayam lokal, daging antisipasi dampak Covid-19, apa tidak tumpang tindih?

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Mohon ijin pak ketua kami jelaskan masalah ayam lokal yang A itu adalah bantuan ayam untuk pengembangan di UPT Perbibitan di Sumbawa...

KETUA RAPAT:

Coba dilihat lagi yang A dan C, atau lanjutin dulu nanti baru kita *breakdown* lagi.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Kemudian bantuan ayam lokal dan pedaging yang semula tidak ada menjadi ada, kemudian bantuan persyaratan produk hewan yang masuk terkait kesehatan masyarakat.

Kemudian pengawasan ... kami mengambil sampel dari 29.800 sampel menjadi 15.240 sampel, kemudian pengendalian .. produktif dari 82 lokasi kami refocusing menjadi 33 lokasi, sarana dan prasarana penjaminan keamanan produk hewan dari 19 unit menjadi 2 unit saja, kemudian pengembangan pengolahan pangan dan non pangan dari 17 unit menjadi 5 unit, kemudian kelembagaan dan usaha peternakan distribusi pangan asal ternak dari 113 lokasi menjadi 109 lokasi, kemudian norma standar dan pedoman ... direktorat teknis ada 5 layanan menjadi tetap 5 layanan, kemudian sarana dan prasarana internal kantor, kemudian manajemen perkantoran, belanja yang mengikat demikian kami sampaikan pak ketua.

Untuk dukungan antisipasi dampak Covid, mohon ijin kami melanjutkan terkait rencana aksi kami yang anggarannya sekitar Rp201,77 Miliar itu pencegahan Covid itu kami alokasikan Rp2,2 Miliar isinya adalah penyediaan prasarana dan sarana kesehatan, termasuk kami kerjasama dengan kesehatan untuk menyediakan ... kemudian untuk di departemen kesehatan,

kemudian pengamanan ketersediaan pangan itu Rp3 Miliar itu bantuan dukungan penyediaan dan distribusi pangan ternak, kemudian untuk *social safety net* itu Rp196,57 Miliar.

selanjutnya kami mohon ijin kami menyampaikan terkait progres penyerapan *life bird* kami tetap berusaha membantu peternak mandiri, kami mengumpulkan semua integrator untuk berpacu sambil menunggu implementasi permendag nomor ... tahun 2020 dimana BUMN ditugaskan untuk.

Jadi ada 22 perusahaan yang siap untuk menyerap sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi penyerapan *Life Bird* dalam hal ini kami sarankan sesuai pasal 3 ayat 1 dengan penugasan BUMN. Nah kedua memfasilitasi kepada...

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen saya mau tanya dahulu, 45 juta ekor ayam itu, itu dipotong, kemudian di bekukan? Apakah Berdikari dengan PPI punya fasilitas itu? Ini kan sama saja memperpanjang mata rantai. Saya pernah bicara dengan anda saudara dirjen setiap rakortas sampaikan apa yang menjadi kenyataan, tapi anda waktu itu menantang saya menjawab apa silahkan bapak membuat surat saja ke rakortas, saya benar-benar tersinggung sama pembicaraan anda waktu itu masalah daging kerbau itu. Ini kan harusnya berbicara dong di rakortas itu, "bapak, ibu, Berdikari punya kah fasilitasnya?, PPI punya kah fasilitas rumah potong hewan?" kan tetap juga dibawa ke tempat pemotongan ayam bayar, kemudian diangkut untuk dibekukan bayar juga, ini kan memperpanjang mata rantai ini loh yang saya kadang-kadang tidak setuju itu. Sampaikan saja dirakortas itu bahwa ini tidak mungkin, dan apa kemungkinannya. Kalau ini kan sama saja Berdikari beli dari peternak kecil, PPI juga bawa kerumah potong ayam kemudian dibekukan, setelah dibekukan mau dibawa kemana?, dibagikan kepada rakyat? Dengan pakai apa angkutannya?, kemasannya bagaimana? Ini loh yang kadang-kadang saya tidak bisa mengerti kok kerja muter-muter begini.

Yasudah silahkan dilanjutkan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN:

Terima kasih pak ketua, untuk nomor tiga memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha dari PT Universal Agri Bisnisindo ini bergerak dibidang pakan ternak, mereka siap untuk berpartisipasi menyerap *life bird* yang ada di peternakan ini bergerak dan bekerjasama dengan ... dan PINSAR.

Kemudian kesanggupan 22 perusahaan perbibitan dan/atau pakan ternak untuk menyerap *life bird* dari peternakan sebanyak 4.116.000 ekor sudah di mulai sejak 21 april 2020. Progres sampai dengan 27 april sudah terserap 20.291 ribu 937 ekor atau 7,09%. Yang menyerap sampai dengan ini PT ... (suara tidak jelas), dan PT Dinamika mega tama itu yang sudah menyerap.

Jadi ini mohon ijin, kami menyampaikan data kesanggupan mereka sesuai dengan hasil .. kami dengan mereka dan yang belum mengimplementasikan kesanggupan itu kami terus dorong agar segera bisa terlaksana sesuai dengan kemampuan mereka, ada 22 perusahaan yang belum itu adalah PT (suara tidak jelas) itu kira-kira ada 10 perusahaan.

Selanjutnya kami mohon ijin untuk jumlah *setting ground* terkait dengan persiapan lebaran dan puasa dari data jumlah *setting ground* berdasarkan pada periode waktu *setting* dari 16 maret sampai 11 april 2020 berdasarkan laporan semua perusahaan perbibitan ... bahwa di 15 sampai ... maret, 22 sampai 28 maret itu ada 74,442 kemudian di (suara tidak jelas) kemudian dari sini jumlah HG yang (suara tidak jelas) jadi kalo di konversi perminggu Rp47,904.147 jadi kita total (suara tidak jelas) perbandingan schedule orang check bulan maret 2020 secara proporsional 4 perusahaan maka hasil konversi industri bulan april 2020 menjadi sebanyak Rp202.510.234 atau 48.216.747 ekor perminggu. Dalam kondisi normal kebutuhan bulan april 2020 sebanyak 276.830.064 ekor jadi kami dalam kondisi normal kita kekurangan DOC sebanyak (suara tidak jelas). demikian yang dapat kami jelaskan pak ketua.

Terima kasih,
wassalamuallaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Bisa lanjut ke kepala badan...

KETUA RAPAT:

Iya lanjut, nanti yang khusus PKH kita bedah karena data-data ini hampir semuanya tidak benar.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Assalamuallaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Para Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak, Ibu Eselon I sekalian yang ada disini.

Ijinkan kami menyampaikan penghematan dari refocusing anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020.

KETUA RAPAT:

Bapak Kepala Badan, saya mau tanya dahulu. Masih ingat waktu itu anda mengatakan di rakortas bahwa ketersediaan gula 368 ribu ton cukup, itu gimana masalahnya supaya saya bisa tahu?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Iya baik bapak, kami sampaikan itu totalnya adalah merupakan penjumlahan dari penugasan impor dan pengalihan rapinasi ke ...

KETUA RAPAT:

Jadi yang 368 Ribu ton itu termasuk yang rapinasi dan impor, bukan ketersediaan?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Bukan..

KETUA RAPAT:

Waktu itu anda mengatakan ketersediaan gula cukup dengan jumlah 368 ribu ton, itu gula rapinasi dan gula impor loh.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

itu maksud kami (suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Nanti datanya saya kasih ke anda supaya anda melihat datanya, yang rapat di ratas maupun di rakortas supaya jangan ada dusta diantara kita kita. supaya jangan membuat data yang tidak benar, kalau tidak benar kasian bangsa dan negara ini.

Ya silahkan dilanjutkan..

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Baik, Bapak ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI, Refocusing Kegiatan dan Anggaran dari Badan Ketahanan Pangan tahun 2020 semula adalah Rp663 Miliar setelah penghematan menjadi Rp475 Miliar ini yang tentunya kami fokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat dan distribusi pangan, yang pertama adalah:

1. Pemantapan ketersediaan dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting* Ini total alokasinya, menjadi Rp169 Miliar semula Rp215 Miliar yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Pertanian Keluarga; dan
 - b. Pertahanan Pangan Lestari.
2. Penguatan pasokan distribusi stabilisasi dari harga pangan yang semula adalah Rp238 Miliar menjadi Rp176 Miliar, kegiatannya:
 - a. Lembaga distribusi pangan;
 - b. Fasilitasi distribusi dan Stabilisasi harga pangan;

- c. Penguatan Toko Tani Indonesia; serta
- d. Penguatan cadangan dan lumbung pangan masyarakat.

Dua kegiatan utama ini yang utamanya adalah bantuan Pemerintah kepada masyarakat.

- 3. Pengembangan hilirisasi dan industri pangan lokal yang semula Rp10 Miliar menjadi Rp4 Miliar,
- 4. Penguatan keamanan pangan dan mutu pangan yang semula Rp24 Miliar hampir Rp25 Miliar menjadi Rp7 Miliar,
- 5. Kajian dan kebijakan ketahanan pangan yang semula Rp66 Miliar menjadi Rp29 Miliar, terdiri dari kegiatan;
 - a. Pemantauan stok akses cadangan pangan;
 - b. Pemetaan situasi kondisi pangan;
 - c. Penerapan Ketahanan, Pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan.
- 6. Kegiatan yang berkaitan dengan dukungan ketahanan daya tahan tubuh, dan
- 7. Terkait dengan manajemen, manajemen ini kurang dari 10% kira-kira pak.

Itu pak kegiatan di Badan ketahanan Pangan secara lengkapnya, terima kasih

Wassalamuallaikumwarrahmatullahi wabarokatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas Penjelasannya,
Cukup ya Pak Sekjen,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Iya cukup bapak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengajukan pertanyaannya.

Yang pertama, pak kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamuallaikum warrahmatullahiwabarokatuh.

Teman-teman mohon maaf, kebetulan jam 11.00 ini saya ada rapat ditempat lain ada 2 di Baleg dan Fraksi. Jadi begini Pak Ketua, setelah saya membaca expose dari perkebunan Hort, PKH dan satu lagi tadi. Saya agak terkejut.

KETUA RAPAT:

Badan Ketahanan Pangan Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODDIPURO, M.M.):

Badan Ketahanan Pangan saya terkejut. Kita ini di Kementerian Pertanian itu ikonya itu sebetulnya perkebunan, horti dan PKH. Tapi justru anggarannya dipotong lebih dari 50%. Jadi yang mestinya prioritas mendesak dan penting itu anggarannya lebih besar, pemotongannya kecil. Kalau di lihat jumlahnya 21 triliun hanya 7 triliun berarti hanya 30, kenapa? Seperti Horti tadi ada kegiatan yang sampai dipotong 90% itu. Ini secara makro saya sampaikan kurang paslah gitu ya. Sedangkan ikonnya ini di perkebunan, horti dan PKH kenapa kok justru Eselon I pendukungnya lebih besar, potongannya lebih kecil ini. Ini perlu dicatat ini. Kedepan kayak seperti ini tidak pas gitu.

Yang kedua, tadi saya saranin sih saya menyampaikan juga saya sampaikan, perlu adanya rincian kembali nih. Saya tidak mau detail. Sudah ada detailnya, seperti pengurangan-pengurangan yang sangat drastis. Juga tadi ada pengembangan basis data sampai 70-an miliar itu apa, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua. Juga mengenai pengolahan ini. Pengolahan dari 86 miliar jadi 7,9 miliar, 10% ini di Horti ini. Ini bagaimana itu?

Terus yang kedua, dalam rangka Covid-19 untuk mestinya saran saya ini jangan proyek lagi. Digunakan langsung untuk membeli hasil yang diterima dari masyarakat. Contohnya horti. Horti itu sampai luar biasa ini hampir 58 miliar. Saya tidak melihat untuk melakukan kegiatan pengadaan misalkan beli sayur-sayuran masyarakat langsung dibagikan, contohnya di kehutanan. Kehutanan itu mengalokasikan anggaran untuk membeli hasil hutan, beli madu dan lain-lain langsung dibagikan kepada masyarakat. Kelautan, dia membeli ikan yang tidak laku langsung dibeli dan dibagikan kepada masyarakat. Ini belum saya mendengar, justru Covid-19 itu yang lumayan besar anggarannya ini kok belum ke arah sana. Pada umumnya ini dalam bentuk proyek, tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang sedang dihadapi pada saat ini.

Saya kira itu Ketua. Dan saya mohon ijin Ketua bergeser. Mohon maaf karena kami ada rapat di Fraksi.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kanjeng.

Selanjutnya Pak Dr. Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, Anggota dan Sekjen.

Saya ingin menyampaikan bahwa saya prihatin dengan terjadinya pemotongan yang cukup besar terhadap anggaran di Kementerian ini, termasuk dari Dirjen-Dirjen yang kita hadirkan pada hari ini. Yang kita tahu bahwa sektor pangan itu atau Kementerian Pertanian ini adalah merupakan penopang utama untuk kesediaan pangan. Bila kita tidak berhasil melakukan stok pangan pada masa Covid dan Ramadhan ini.

Saya hanya mengkhawatirkan bahwa masa pemberlakuan Covid ini akan lebih panjang dibandingkan dengan usaha-usaha kita. Jadi terdapat perlambatan usaha-usaha kita dibandingkan dengan kecepatan dari penyebaran Covid ini. Lantaran ini bisa mengakibatkan kita akan menghadapi kekurangan pangan pada masa-masa berikutnya.

Nah ini satu persoalan buat kita, persoalan bangsa yang harus kita atasi. Karena bila pangan kita kurang, asupan kita kurang maka antibodi sosial kita juga menjadi kurang dan itu akan sangat mudah covid menyerang kita. Nah ini tentu akan memperlambat usaha kita dan mempercepat panjangnya waktu kita. Nah ini harus kita pikirkan.

Saya termasuk yang tidak setuju ada pemotongan di Kementerian Pertanian ini. Oleh karena itu pemotongan-pemotongan semacam ini saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa saya tidak setuju. Mulai dari 21 dihemat menjadi 7, kemudian pagu akhirnya menjadi 14. Ini sangat prihatin buat saya.

Dan juga saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai Anggota DPR ini punya hak budget untuk menetapkan anggaran. Jadi jangan kita memiliki suatu atau membiarkan adanya Perpu dan juga Perpres, dan juga Kemen Keuangan dan juga Kemen Pertanian yang memperlemah hak budget kita. Oleh karena itu saya minta supaya Dirjen-Dirjen ini, ini harus benar-benar memiliki kekuatan untuk memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi harus disampaikan di Rapat itu kayak apa. Sehingga anggaran kita ini tetap stabil.

Nah kemudian terkait dengan program-program lain. Saya sebenarnya sudah tidak tertarik lagi membahas program-program ini. Karena memang secara umum program kita ini sudah memiliki pengurangan-pengurangan yang cukup besar sehingga tidak ada dampaknya juga terhadap pembangunan sektor pertanian kita. Dan saya khawatir ditengah masyarakat yang sedang lapar ini bisa terjadi berbagai masalah sosial yang kita hadapi.

Nah ditengah kelaparan ini justru Kementerian Pertanian inilah yang hadir untuk membebaskan rakyat kita dari kelaparan. Kalau kita memiliki kekurangan anggaran seperti ini saya khawatir kelaparan itu semakin dalam dan bisa jadi kemungkinannya adalah konflik sosial juga akan semakin dalam. Ditengah kita juga sekarang menghadapi masalah-masalah keamanan yang akhir-akhir ini terjadi. Dan juga diberbagai daerah pun juga kita mengalami

adanya protes-protes baik dari Bupati, maupun juga Kepala Desa dan lain sebagainya. Ini dalam rangka mereka ini sedang tertekan dengan anggarannya. Nah saya khawatir nanti kalau dari Pusat ini sudah begitu besar potongannya, kemudian ke daerah pun juga semakin berdampak lebih luas dan juga semakin desa pun juga semakin tambah luas. Nah inilah akibat daripada pemotongan yang berlebihan.

Oleh karena itu saya ingatkan saya sejak awal tidak setuju dengan adanya pemotongan itu. Nah bilapun ada program-program yang nanti akan kita pertahankan. Saya minta supaya program yang berkaitan basis sosial ini harus tetap dipertahankan. Tidak terjadi refocusing, tidak terjadi penghematan. Sehingga ini kita khawatir bahwa Anggota ini semuanya sekarang sudah CPCL semuanya. CPCL ini kita sudah menjanjikan kepada masyarakat bahwa kelompok ini sudah didaftarkan di Kementerian dan siap Inshaa Allah akan dialokasikan. Bila terdapat kekurangan, ini kita akan berhadapan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang lebih parah lagi. Saya minta supaya program yang berbasis masyarakat ini tetap dipertahankan dan bila perlu ini harus ditambah, misalnya terkait dengan pupuk, dengan Alsintan dan segala macamnya.

Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Dirjen PKH ini saya minta supaya di pending dulu Pak Ketua. Karena saya melihat ini memberikan legalisasi terhadap perusahaan-perusahaan besar untuk dominan terhadap bisnis ternak ayam ini. Karena saya melihat ini memberikan peluang yang sangat luas kepada perusahaan-perusahaan besar untuk dominan terhadap peternak-peternak rakyat. Kita khawatir apa yang terjadi di beberapa tempat kemarin ada peternak-peternak rakyat itu melepaskan anak ayamnya karena khawatir kalau tidak terserap. Nah ini satu persoalan. Saya minta supaya anggaran untuk PKH ini kita tinjau ulang lagi.

Saya sepakat dengan Pak Ketua, ini kita harus dalam terkait dengan peran-peran perusahaan-perusahaan besar yang dominan di sektor ayam dan unggas itu. Dan juga saya mempertanyakan, ada 45 juta ayam setara dengan 50.000 ton harkas. Ini keperluannya untuk apa gitu loh. Ini siapa yang menyalurkan nanti dan untuk siapa harus kita pertanyakan.

Kemudian terkait dengan soal Dirjen Hortikultura. Itu terdapat ada program covid. Ada 5 program covid yang tertulis disitu tapi tidak jelas volumenya. Yang jelas ada angka nominalnya tapi volumenya tidak jelas. Ini ada berapa paket, berapa unit itu tidak jelas. Saya minta ini diperjelas dan untuk apa, dan melalui apa penyalurannya. Saya minta ini harus bisa diadvokasi oleh Anggota Komisi IV.

Kemudian terkait dengan soal *social safety net*. Ini ada 196,5 ini di Dirjen PKH ya. Nah ini saya minta supaya *social safety net* ini harus diperjelas jenis barangnya apa. Sebab saya melihat disitu bentuk-bentuk barangnya itu bersifat jangka menengah keatas, sementara sekarang ini adalah masalah negara di tengah kelaparan. Jadi saya minta supaya ini adalah bentuk barang yang bisa mengatasi kelaparan masyarakat. Bukan mereka memelihara lagi,

menanam lagi. Dan itu perlu waktu 2-3 bulan. Dan kalau sudah 2-3 bulan untuk apa. Sementara yang lapar itu adalah hari ini, bukan hari esok. Saya minta supaya diperjelas bentuk barangnya apa.

Kemudian juga terkait dengan soal lembaga distribusi pangan dan memfasilitasi distribusi pangan. Ini juga tidak jelas. Ini siapa yang menjadi lembaga ini dan siapa yang memfasilitasinya. Dan ini untuk apa.

Demikian Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak senior Pak Made Urip. Pak Made Urip ada? Kalau Pak Made belum terlihat. Kita dahulukan Saudara saya yang dari NTB Pak Johan.

Silakan Pak Johan. Pak Johan belum ada. Silakan Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Dirjen, semua Dirjen yang hadir, dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Saya punya beberapa hal yang ingin saya kritisi. Yang pertama terkait dengan yang disampaikan oleh ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan. Saya sangat menyesalkan sekali sebagaimana penyesalan kita semua sebenarnya yang terkait dengan pemotongan anggaran yang sangat besar di Kementan ini yang kemudian implikasinya menjadi kacau balau semua anggaran dan juga kegiatan dari Dirjen atau pun juga lembaga atau Badan dibawah Kementan ini. Salah satunya tadi yang disampaikan bahwa anggaran untuk pengentasan daerah rawan pangan dan *stunting* saja yang sebelum covid saja itu menurut saya itu sudah kecil, sekarang kemudian juga dikurangi menjadi lebih kecil lagi. Tadi anggaran Rp238 Miliar sekian hanya menjadi Rp176 koma sekian Miliar.

Nah ini yang saya khawatirkan Pak. Ditengah ancaman *stunting* di Indonesia ini yang masih sangat tinggi bahkan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan meskipun kemarin sempat turun kecil maka usai pandemi ini ya akan naik lagi, dan itu kita tidak tahu seberapa besar kenaikannya. Termasuk juga didaerah saya yang kebetulan masih menyumbangkan angka stunting di Sragen itu 39,6% dengan kondisi anggaran yang dipotong sedemikian rupa, apakah ini tidak akan mengancam masa depan Indonesia kelak. Bukan hanya di Dapil saya, ini secara keseluruhanlah di Indonesia.

Jadi ini satu catatan saya Pimpinan dan pihak Kementerian bahwa anggaran untuk pengentasan daerah rawan pangan dan *starting* tolong tidak dikurangi. Jadi kalau ada pengurangan anggaran, silakan dicoba lagi, disisir lagi, mana kegiatan yang memang benar-benar tidak relevan untuk bisa menjawab situasi dimana kita bisa pandemi corona ini. Jadi kalau mau refocusing ya fokusnya seperti ini. Ini jangan dikurangi, kalau perlu malah ditambahkan. Karena apa? Kemiskinan itu bisa menyebabkan orang mengalami keterbatasan untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang layak, makanan yang cukup. Apalagi kondisi yang seperti sekarang.

Kemudian yang terkait dengan Dirjen PKH. Ini ada persoalan yang krusial. Tadi tidak terlalu banyak disebutkan tentang ayam sebenarnya. Padahal kita beberapa waktu yang lalu pernah ketemu juga, ngobrol bareng dengan asosiasi yang terkait dengan perayaman atau perunggasan dimana harga ayam jatuh luar biasa. Ada yang 9000 yang *life bird*, ada yang 10.000. Ini kan ada persoalan penguasaan dari hulu sampai hilir Pak. Entah kapan kemudian Kementerian ini melakukan reformasi total bahwa ada hal yang tidak benar dalam industri perunggasan kita ini.

Nah apakah kita juga bisa mengambil momentum pada saat-saat sekarang untuk evaluasi total bahwa kalau cara-cara bisnis *as usual* itu tetap dibiarkan begitu saja, sudahlah naik. Yang namanya nasibnya para peternak ayam ini sampai kapan pun dia akan kayak gini saja. Pada saat butuh pakan, harganya luar biasa tingginya. 70% bahkan kemudian untuk kebutuhan produksi dia ya hanya habis untuk pakan. Tapi kemudian pada saat harus jual kemudian tiba-tiba harganya seperti ini. Dulu yang namanya integrator itu kan tidak bisa punya kandang. Tapi sekarang mereka bahkan punya kandang sendiri dengan jumlah ayam yang jutaan. Ya otomatis mereka tidak butuhlah itu yang namanya dari peternak-peternak kita.

Nah tadi terakhir disebutkan saya malah tahunya dari medsosnya Kementan juga bahwa ini kan seolah-olah bagus ya bahwa ada serapan ayam peternak. Tetapi Bapak tidak menyampaikan ke kita, berapa sebenarnya harga yang dibeli ke peternak itu per kilonya. Itu tidak sampai harga HPP Pak. Jadi harganya itu hanya sekitar 10 sampai 15 Ribu per kilonya. Itu artinya bahwa ini tetap saja tidak memenuhi kebutuhan peternak untuk bisa dibeli dengan harga yang minimal sama dengan HPP yaitu 18.000 per kilonya.

Nah ini tolong menjadi koreksi semuanya karena pelibatan perusahaan besar itu yang seolah-olah ini seperti kayak sinterclause, tetapi sebenarnya ini hanya mencegah sesat untuk tidak membuang ayam dijalanan atau dilapangan seperti yang sebelumnya.

Yang terakhir Pimpinan yang terkait dengan Dirjen Horti. Saya juga sangat menyesalkan sekali. Karena ini kan menjadi salah satu icon ya atau fungsi utama dari Kementerian ini. Jadi ada horti, kemudian tanaman pangan, dan lain-lain itu seharusnya refocusing dan realokasi anggaran itu justru kalau menurut saya ini untuk mempertahankan agar fungsi utama ini tidak

terganggu. Sementara mungkin anggaran-anggaran lain yang tidak terkait langsung dengan kepentingan kita untuk tadi, distribusi, produksi pangan, kemudian juga sarana-prasarana, kemudian juga perbenihan dan macam-macam itu tidak terganggu. Tapi ternyata pemotongannya bahkan hampir 50%. Bagaimana bisa menjelaskan ada pemotongan anggaran hampir 50%. Apa yang kemudian harus dikorbankan. Nah kalau kemudian dikorbankan adalah Tupoksi utama atau fungsi yang utama dari Kementerian ini maka sebenarnya kita sudah kehilangan arah, kita kehilangan fokus. Kita kehilangan tujuan dari Kementerian ini diadakan yaitu menjaga agar produksi, pasokan, keamanan, distribusi dan bahkan petaninya itu yang kita jaga.

Bapak Dirjen yang saya hormati,

Saya terus terang saja agak terharu. Ketika semuanya sedang diminta untuk karantina dirumah. Bapak tahu dimana petani itu berada. Mereka itu turun ke sawah Pak, tetapi kemudian siapa yang melindungi kepentingan mereka kalau bukan kita semua. Termasuk misalnya anggaran untuk apa namanya imunitas dan lain-lain semuanya, saya lihat itu memang masuk untuk pegawai. Saya itu ingin itu juga masuk untuk petani, untuk keluarga petani. Sehingga petani itu juga punya daya tahan yang sangat kuat ketika mereka harus mengambil resiko pekerjaan, mereka tetap harus turun ke sawah. Menuju ke sawah itu kan tidak bisa terbang, mereka harus keluar rumah, mereka harus jalan. Mungkin mereka juga ketemu orang per orang, dan lain sebagainya.

Saya kira Pimpinan monggo, ini sama-sama kita bicarakan meskipun dengan hati bening tetapi mesti kita untuk melindungi kepentingan petani dan sektor pertanian ini menjadi kewajiban kita bersama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Luluk.

Kita kembali ke Pak Made Urip. Sudah siap Pak Made Urip? Pak Made? Kalau begitu Pak Johan?

Silakan. Kalau Pak Johan ada tidak, Pak Johan? Oke kalau Pak Johan belum, Pak Suhardi Duka silahkan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat, Sekjen, dan Pejabat Eselon I di Kementan yang juga saya hormati.

Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Darori, kemudian Pak Hermanto, tadi juga dengan Mbak Luluk. Saya kira nada kita hampir semua tidak jauh dari itu. Yang pertama karena memang dalam covid ini ada 2 hal yang mendasar. Yang pertama adalah bagaimana kita mencegah. Yang kedua adalah bagaimana ketersediaan pangan. Jangan sampai hal yang kedua ini terjadi bagi Indonesia kekurangan pangan dan ini adalah malapetaka ditengah negara agraris tapi kekurangan pangan. Ya kita menyayangkan memang karena justru kita menganggap bahwa masalah petani atau masalah pangan tidak menjadi prioritas. Karena justru mendapat potongan anggaran yang cukup besar sampai dengan 7 Triliun.

Ya okelah, saya kira Kemenkeu hanya memotong 7 Triliun, tidak memotong Dirjen per Dirjen. Saya ingin tanya kepada Pak Sekjen, sebenarnya siapa yang memotong per covid 4 Dirjen di Kementerian Pertanian ini? Sehingga tidak adil cara motongnya. Ada yang hanya 6% dipotong, ada yang sampai 50%.

Justru hal-hal yang mendasar bagi kepentingan petani dan kebijakan pertanian itu dipotong sampai dengan 50%. Katakan seperti tanaman pangan 42%, kemudian Dirjen BUN 53%, BSP 44%. Sedangkan secara menyeluruh kan 30% dipotong Kementerian Pertanian. Jadi kalau mau adil ya 30% saja secara menyeluruh. Itu yang pertama. Jadi kebijakan siapa ini, apakah Menteri yang langsung melakukan pemotongan kepada Eselon-Eselon I ini ataukah ada kekuatan yang ada di Kementerian Pertanian yang memiliki kekuatan penuh untuk bisa memotong sehingga Dirjen-Dirjen ini tidak berdaya untuk memberikan argumentasi terhadap kepentingan atau kepentingan masyarakat terhadap ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak para Dirjen. Saya setuju sih refocusing untuk stimulus penanggulangan covid. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang dibutuhkan rakyat ini sekarang adalah mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan. Yang dibutuhkan adalah mereka mau makan. Bukan memelihara ayam. Kalau pelihara ayam mereka tidak mau, tidak butuh sekarang. Kalau mencari yang murah kalau dikasih untuk memelihara buat apa. Yang dibutuhkan sekarang mereka mau makan ayam, untuk buka puasa, untuk makan sahur. Justru mau dikasih untuk pelihara ayam. Habis semua sampai dengan 100 Miliar. Saya kira ini langkah-langkah yang tidak benar. *Social safety net* itu, stimulus itu bukan untuk orang-orang yang kuat, bukan untuk perusahaan tapi orang-orang yang lemah. Jangan dikasih yang sudah kuat, yang sudah punya modal. Tapi justru dikasih yang lemah. Masyarakat kita yang tidak berdaya ini. Ini yang saya harapkan kepada kita semua.

Yang terakhir adalah Kementerian Pertanian kan bekerja sama dengan banyak BUMN. Banyak dengan perusahaan-perusahaan besar. Apakah Kementerian Pertanian tidak bisa mengambil CSR dari BUMN dibawahnya atau partner-partner perusahaan yang bisa memungkinkan untuk dikelola, untuk bisa dikembalikan kepada rakyat dari. Mereka mengambil kesempatan dari kebijakan Kementerian Pertanian terhadap perusahaan-perusahaan itu untuk masuk CSR-nya. Kita tidak membandingkan dengan yang lainnya.

Yang lainnya Kementerian seperti KLHK. KLHK bisa mengambil dari CSR untuk bisa dibagikan kepada masyarakat. Kalau tidak bisa kita bagi ayam dan lain sebagainya, bagi beras. Kenapa Kementerian lain bisa. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan. Tidak terlalu banyak, terlalu teknis saya kira sama kita semua.

Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Terima kasih.

Pak MU sudah ada? Kalau Pak MU belum ada berarti Pak Ansy lema. Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Selamat siang Pak Sekjen, dan para Dirjen.

Saya mulai dengan kesimpulan ini, *refocusing* yang tidak fokus Pak. Penyebabnya karena sesat pikir Pak. Mungkin sesat paradigma sehingga ketika diterjemahkan menjadi level regulasi dan ini keliru total. Saya ingin katakan paradigma dasar kita ini adalah situasi kebencanaan pandemi. Para pembicara sebelumnya sudah menekankan itu Pak. Karena itu dalam *extraordinary* tragedi seperti ini pendekatannya itu tidak bisa yang konvensional atau yang lajim. Tidak bisa yang bisnis *as usual*. Saya tunjukkan buktinya Pak. Yang pertama, di Dirjen Perkebunan. Halaman 4 terdapat pemotongan lebih dari 70% anggaran untuk item pasca panen pengolahan yang pemasaran. Dari 163 M menjadi 55 M.

Ini kan kita tahu bahwa yang terkena dampak ini kan para perkebun, para petani perkebunan. Mestinya mereka inilah yang mendapatkan perhatian dari Kementerian Pertanian. Mereka ini dalam kondisi yang sulit. Keberpihakannya itu tidak nampak Pak. Nah dalam kondisi sulit ini mestinya pendekatan pertolongan, pendekatan penyelamatan yang harusnya dilakukan Pak.

Nah jangan sampai yang digariskan oleh Dirjen Perkebunan ini justru mematikan semangat para pekebun kita, para petani perkebunan kita. Kita ingat ya hari ini betul bahwa pasar itu menurun drastis untuk sektor-sektor perkebunan. Tetapi tidak berarti kemudian perhatian dari Dirjen Perkebunan ini menurun Pak. Jangan sampai mematikan semangat mereka. Kita pernah lihat dulu situasi situasional ketika harga jatuh, pasar kurang bagus, orang

kemudian hopeless dan kemudian mereka membakar produk-produk pertanian dan perkebunan mereka.

Nah saat ini itu jangan terjadi Pak. Karena saya yakin ini sifatnya hanya situasional beberapa bulan kedepan. Karena itu menurut saya, mestinya terhadap para pekebun, para petani perkebunan ini bukan dipotong anggarannya tetapi diberikan stimulus, diberikan insentif. Saya sering katakan Pak, pendekatannya itu adalah *quick yielding income and product*. Yang langsung dimanfaatkan.

Yang kedua, masih di Dirjen Perkebunan Pak, masih di halaman 4 juga Pak. Disitu ada anggaran, pengembangan basis data spasial, peningkatan sistem informasi perkebunan berbasis web, android, dan pemutakhiran sistem komunikasi berbasis data sebesar 79 M Pak. Saya ingin tanya pak, kenapa item ini anggarannya lebih besar daripada item yang point pertama yang saya persoalkan tadi Pak. Bahkan lebih besar dari anggaran penanganan covid yang jika ditotal ada 4 item itu Cuma 30 Miliar Pak. Ini urgensi dari program data ini apa Pak? Apa urgensinya? Saya ingin katakan bahwa *stomach can not delay*, tidak bisa ditunda perut orang ini Pak. Nah karena itu mohon maaf, jangan aji mumpung Pak dalam situasi seperti ini. Saya akhirnya harus bicara apa adanya Pak.

Yang berikut masih di Dirjen Perkebunan. Dirjen Perkebunan ini punya 4 item kegiatan andalan terkait dengan penanganan dampak covid. Alokasi anggaran untuk pembelian bahan pangan dan obat-obatan itu Cuma 3,4 Miliar Pak. Padahal kita tahu sekarang yang harus diselamatkan itu perut rakyat Pak. Sementara kita lihat tadi ada padat karya, kelapa jenjah. Berarti kan masyarakat disuruh tanam lagi. Saya menggarisbawahi yang dikatakan oleh Senior saya Pak Suhardi Duka tadi. Dalam situasi puasa seperti ini masyarakat disuruh tanam hasilnya tidak sekarang Pak. Sementara kita tahu bahwa kebijakan negara juga jelas Pak *social distancing* dan seterusnya. Nah ini mohon menurut saya bisa dilihat, dipreteli ulang Pak. Jangan sampai mubajir anggarannya.

Yang berikut ke Dirjen Hortikultura Pak. Dirjen Hortikultura ini memasukan program bantuan benih sebagai bentuk penanggulangan covid dan keberlanjutan produksi sebesar 36 M. Sama juga Pak. Artinya ini masyarakat disuruh untuk bekerja Pak. Sementara kita tahu hari-hari ini, itu petani horti kita itu mau panen Pak. Bapak mau kasih benih dalam kondisi hari ini Pak.

Nah beli dulu panen mereka Pak, seperti tadi yang dikatakan. Kementerian Kelautan itu beberapa waktu yang lalu saya terima video dari Nusa Tenggara Timur ikan-ikannya itu banyak tetapi tidak ada pasar kemudian mereka kubur ikannya. Solusinya KKP membeli ikan, kemudian membagikannya kepada masyarakat Pak. Nah ini kalau, terus Bapak ada bantuan lagi kalau tidak salah 14 Miliar untuk bantuan transportasi. Mohon maaf Pak saya mau ketawa. Pasarnya dimana, transportasi ini mau bawa apa, mau bawa kemana Pak. Beli dulu produk mereka yang ada ini, baru kemudian didistribusikan. Kalau tidak dibeli siapa yang beli Pak. Negara hari ini harus

hadir. Ambil peran memberikan subsidi Pak. Tidak bisa diam, tidak bisa hirau. Disisi lain Pak saya mancatat Pak. Kok keberpihakan terhadap MNC, terhadap korporasi besar begitu kuat Pak. Ini ada Pak? Ini saya bicara soal bukan kepentingan kita Pak. Kepentingan rakyat dan Republik ini Pak.

Yang terakhir Pak, kembali lagi Pak dari 800.000 Ditjen PKH turun jadi. Dari 1 Juta turun menjadi 800 Ribu. Kemarin kita sudah diskusi panjang soal ini Pak. Ayam 1 hari dibagikan ke rakyat 2,5 bulan dijual dan kemudian baru ada uang tunai Pak. Ini lagi puasa Pak. Jangan kasih mereka pekerjaan lebih lain lagi Pak. Kemarin Dokter Hewan Slamet PKS itu sudah ngomong secara teknis bagaimana memelihara ayam ini Pak. Menurut saya mungkin bisa dipikirkan alokasi ke tempat lain Pak. Belum 1 hari Pak. Jangan sampai begitu dikasih 2-3 hari mati ayam ini. Saya yakin betul para peternak yang menerima 25 ekor ayam ini itu bukan para peternak yang profesional. Kalau profesional pasti peternakan mereka besar Pak. Mereka harus butuh waktu untuk suntik, untuk dan seterusnya Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Ansy Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Cukup Pak Ketua. Sudah cukup panjang. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya sampaikan mohon maaf.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ansilema.

Pak Johan yang baru selesai sholat.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamuallaikum Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua yang saya banggakan.
Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan teman-teman semuanya.

Saya langsung saja Pak Ketua. Saya mau tanya ke Pak Sekjen, ke Pak Dirjen ini, apa saja yang berubah dari Bansos yang sudah kita sepakati pertama kemarin. Tolong sampaikan sekarang. Akibat.

KETUA RAPAT:

Pak Johan,

Tolong Pak Sekjen jawab sekarang pertanyaan Pak Johan supaya semua Anggota tahu dan mendengar. Tolong dijawab dulu Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Baik Pak Ketua, Pak Johan.

Tentunya perubahan, ada perubahan terkait dengan perubahan bantuan Pemerintah atau Bansos sesuai dengan struktur anggaran yang ada. Tapi komposisinya sesuai arahan Pak Menteri tetap untuk bisa memenuhi teman-teman di Dapil. Hanya jumlahnya, tapi saya analisis lagi. Karena dari pertemuan RDP kemarin kan ada perubahan juga. Kami mau ada analisis lebih lanjut. Mudah-mudahan pengurangannya tidak ada tapi sesuai dengan struktur anggaran yang ada.

Barangkali demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sekjen.

Pak Johan lanjutkan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Itu sengaja saya tanyakan Pak Ketua. Biar jangan sampai kita menganggap bahwa kita ditinggal ini sama mitra kita ini. Bansos tidak diturunkan, tetapi ATM beras timbul dimana-mana, makanya itu tidak pernah kita bicarakan sebelumnya, ya kan. Itu pertama.

Yang kedua, saya inginnya itu covid ini harus kita jadikan sebagai *milestone* untuk kita meningkatkan produksi dalam negeri. Mumpung dunia lagi di *lockdown* Pak, mari kita introspeksi diri kita meningkatkan produksi dalam negeri. Ambil contoh misalnya Dirjen Perternakan, di Dirjen Peternakan. Ini pencegahan covidnya Rp2,25 miliar, pengamanan ketersediaan pangannya Rp2 Miliar, social safety net-nya jauh Rp196,57 miliar.

Pak Sekjen,

Kita ini, Kementerian kita ini sudah dipotong Rp7 Triliun. Untuk apa? Ya untuk *safety net* itu, untuk kesehatan dan lain-lain. Kenapa lagi dalam

anggaran refocusing kita, kita pahami, kita taruh program-program kayak begini. Harusnya menurut saya, kok anggaran kita Rp7 Triliun sudah dipotong *safety net*, untuk kesehatan, untuk apa dikelola oleh tempat lain. Nah Kementerian Pertanian sebagai sektor hulu itu harus fokus kepada peningkatan produksi dalam negeri.

Nah peternakan hewan. Peternakan hewan sudah banyak diceritakan sama teman-teman tadi itu tentang ayam, segala macamnya sudahlah itu. Tapi misalnya kayak kerbau, segala macam Pak. Kenapa kita harus tetap ngotot impor. Saya sering kritik Pak Dirjen PKH, Pak saya 7 tahun tugas di NTB. Saya tahu betul.

Nah untuk itu saya ingatkan Pak Dirjen, di Sumbawa itu gudangnya kerbau. Apa yang kurang disana, alat-alat produksi. Apa yang kurang disana, mungkin cara beternaknya ya mungkin. Sampai ada profesor kerbau di Sumbawa itu Pak Dirjen. Makanya kenapa kita tidak meningkatkan produksi dalam negeri kita. Jadi maksud saya itu, sudah anggaran kita dipotong, cukup sudah kita sesali, sudah 2 rapat kita bersesal-sesal tentang Rp7 Triliun ini. Sekarang mari dengan sisa anggaran ini kita fokus terhadap peningkatan produksi dalam negeri.

Contoh misalnya di Dirjen Hortikultura. Hortikultura Pak, fokusnya tanggap darurat kita ini dibuah-buahan, sayur-sayuran atau tanaman obat? Ini covid ini orang harus banyak makan buah. Ditambah lagi orang puasa, sebentar lagi orang lebaran. Jadi ada 3 moment yang membuat orang makan buah. 1. Covid, 2. Puasa dan 3. Lebaran. Dimana ketersediaan buah kita Pak. Ya sementara impor sudah tidak bisa lagi, orang sudah pada *lockdown*. Nah bagaimana kemampuan produksi kita. Kenapa kita tidak memberikan anggaran yang besar untuk meningkatkan produksi buah, sayur kita dan lain-lain sebagainya.

Mungkin terakhir untuk Badan Ketahanan Pangan. Soal ketersediaan stok Pak. Saya khawatir ketersediaan stok kita Pak. Ketersediaan stok pangan dalam negeri karena secara global ada kecenderungan negara produsen itu lebih memprioritaskan untuk dalam negerinya. Nah bagaimana dengan kita ini kalau kita misalnya memberikan program-program kebun lestari segala macam kepada masyarakat. Ini kan rata-rata Indonesia sudah pada zona merah. Nah memberikan program kepada zona merah itu kan ada keterbatasan. Para petani untuk ikut keluar, untuk berproduksi segala macam. Belum lagi ketahanan produksi-produksi kita itu, tanaman-tanaman kita itu terhadap cuaca dan lain sebagainya.

Mungkin itu Pak Ketua. Kurang lebih mohon maaf.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pimpinan yang mulia Pimpinan saya Pak Kyai Hasan Aminuddin.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehat Pak Ketua, karena harus memimpin sendiri ini di Jakarta. Dan mohon maaf saya harus di kampung.

Yang saya hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV, Pak Sekjen selalu manajer di Kementan yang saya banggakan, dan segenap Pejabat Eselon I.

Yang pertama, saya ingin mengulang. Kemarin judul “*selamatkan nyawa rakyat dan petani*”. Ini tolong diresapi Pak Sekjen agar supaya perencanaan Pak Sekjen ini betul-betul berpihak kepada nyawa rakyat hari ini dan petani karena Tupoksinya Kementerian Pertanian. Yang ingin saya jawab sebelum menjawab yang lain. Saya ingin memperkuat apa yang disampaikan Pak Johan, *Al-Haj* Ustadz Johan tadi. Dengan pemotongan anggaran Kementan ini apakah Bansos itu disusunnya secara proporsional dan rasional. Saya ingin perencanaan 3 bulan ini Pak. Selamatkan nyawa rakyat kan berbicara perut. Bagaimana perut rakyat hari ini bisa hadir negara sebagaimana Doktor ansy lema tadi menyampaikan. Petani hari ini sedang panen, apakah ada perencanaan Kementan ini membeli hasil pertanian rakyat, gabahlah dalam hal ini. Kita beli dan selanjutnya digiling. Setelah digiling diserahkan kembali kepada rakyat tanpa harus transit di gudang mana pun kecuali gudang slap yang itu dibayar oleh negara untuk diproses dan selanjutnya diberikan. Ini yang perlu dijawab, apakah ada perencanaan untuk itu.

Yang kedua, hortikultura tadi. Hasil buah itu sebaiknya tidak usah dijual hari ini. Negara tidak boleh menjual sudah. Diberikan langsung kepada rakyat. 2 hal ini saya mohon jawaban langsung dari Pak Sekjen selaku perencana anggaran dan penguasa anggaran. Kekuasaan eksekutif tertinggi ini kan Sekjen.

Yang ketiga, tolong ada klarifikasi. Saya ini telinga biar tidak penuh. Keberadaan ATM beras di Jakarta itu oleh APBN, atau oleh pihak ke-3 CSR-nya mitra Kementan. Kalau memang itu CSR Kementan, saya mohon ada sebaran bukan hanya di Jakarta, namun di seluruh Republik Indonesia minimal di 54 Kabupaten/Kota seluruh Republik Indonesia sebagai percontohan bahwa kita hadir Wakil Rakyat sebagai mitra Kementan.

Tiga hal ini sekali lagi butuh jawaban langsung sehingga rapat hari ini ada kejelasan dan penjelasan secara langsung. Sehingga keterbukaan Kementan ini betul-betul terbuka kepada wakil rakyatnya.

Saya kembalikan kepada Pak Sudin. Hanya 3 hal dan butuh jawaban konkrit ini agar supaya.

KETUA RAPAT:

Mau dijawab sekarang atau nanti Pak Kyai?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ya dijawab langsung sehingga Bansos hari ini bisa dikeluarkan oleh Kementan sebelum lebaran. Karena lebaran ini sudah butuh perut rakyat sebagaimana Pak Ansi lema tadi.

KETUA RAPAT:

Oke. Kalau ATM beras saya semalam dapat info. Katanya, konon katanya, itu CSR dari Bank BNI katanya. Karena saya juga tidak tahu betul atau tidaknya. Mudah-mudahan betul, karena bagaimana pun BNI termasuk didalam HIMBARA (Himpunan Bank-Bank Negara) yang mendapat jatah untuk menyalurkan kartu tani.

Pak Sekjen silakan dijawab pertanyaan Pak Hasan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Baik.

Pertama, Bansos tetap ada. Nanti segera saya koordinasikan supaya bulan puasa ini Bansos yang dulu sudah ditandatangani saya dan Pak Ketua sebagian saya upayakan bisa dicairkan. Saya nanti koordinasikan dengan Eselon I Pak Pimpinan Pak Kyai Hasan. Prinsipnya Bansos tetap masih ada.

Kemudian yang kedua, tadi yang bantuan langsung. Memang kami tadi pagi diskusi dengan teman-teman. Semula memang bantuan langsung dalam bentuk sembako pertanian. Pengertian sembako pertanian, mungkin tadi ada beberapa teman yang kurang sependapat. Sembako pertanian itu ya benih, pupuk, pestisida. Tetapi kan teman-teman ingin membeli produk. Nah ini kami nanti coba diskusikan lagi untuk program SOS, bisa membeli produk dari petani, dan ini sudah dilakukan tapi jumlahnya belum signifikan yaitu Badan Ketahanan Pangan ini membeli beras dari Poktan dan Gapoktan. Nanti Pak BKP bisa menambahkan.

Kemudian yang terakhir untuk ATM tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Jadi ATM itu sebetulnya terbatas sementara di Jabodetabek, kerjasama dengan teman-teman BUMN menggunakan dana CSR. Memang tadi pagi disampaikan oleh Menteri kalau bisa 52 Dapil bagus juga. Artinya ini dengan BUMN.

Demikian Pak Ketua. Ada yang mau menambahkan?

KETUA RAPAT:

Itu Pak Sekjen, saya mau tanya Pak Sekjen. ATM-nya itu milik atau bantuan CSR. Isinya, berasnya bagaimana?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Isinya memang.

KETUA RAPAT:

APBN?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Kalau mestinya sama ada sedikit bantuan transport untuk petugas, kami yang menyiapkan.

KETUA RAPAT:

Berarti berasnya itu dari APBN?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Berasnya dari BUMN, dari CSR. Sementara BNI. Tapi sudah banyak yang berminat.

KETUA RAPAT:

Oke. Ya Pak Slamet mau interupsi apa?

F-PKS (drh. SLAMET):

Iya Pimpinan.

Bisa masuk Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Sebentar ya, setelah Pak Dedy ya Pak Slamet ya.

F-PKS (drh. SLAMET):

Eenggak, terkait ATM. Mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PKS (drh. SLAMET):

Jadi kalau disebutkan itu CSR Pak Ketua, itu pembahasan kita yang kemarin di program. Badan Pengembangan Pertanian itu Nomor 5 itu ada itu perakitan mesin ATM Pimpinan. Jadi mohon dikonfirmasi. Ada di program yang kemarin kita bahas perakitan mesin ATM nah itu CSR. Nah itu mohon di konfirmasi Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Sekjen bisa langsung jawab?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Ya mesin memang, untuk mesin menggunakan anggaran dari kita Pak Ketua. Untuk sementara ini.

KETUA RAPAT:

Tadi katanya dari CSR mesinnya?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

CSR itu isinya, berasnya Pak Ketua. Barangkali Pak Dirjen bisa menambahkan.

F-PKS (drh. SLAMET):

Kok jadi membingungkan Pak Ketua.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Tidak membingungkan. ATM nya, mesinnya dari kita.

KETUA RAPAT:

Itu memakai dana APBN mesinnya?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Ya. Coba Pak Kepala BKP bisa bantu jawab.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Mohon ijin Pak Ketua. Mesinnya memang menggunakan APBN. Sementara ini kita menggunakan APBN-nya pertanian. Tapi isinya itu adalah CSR dengan BNI. CSR BNI, itu sementara Pak. Tapi kita kedepan, tentunya untuk kedepan kita menggunakan BRI misalnya (suara tidak jelas).

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi begini Pak Ketua, ternyata memang asumsi-asumsi Pak Ketua yang terjadi pada saat ini. Ini memang ternyata jadi nyata gitu loh. Ada semacam penyimpanganlah dalam penerapan prosedur dan aturan yang ada. Bahwa kita kan masih dalam proses penetapan anggaran. Bahwa kita sekarang ini adalah masih dalam tahap perencanaan. Tapi tiba-tiba kita disajikan 1 program yang sudah diputus dan direalisasikan oleh Kementerian. Saya pikir ini satu hal yang tidak kita tolerir ini Pak Ketua. Karena kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Slamet bahwa itu ada programnya tapi kan kita belum menetapkan eksekusinya.

Nah ini nanti perlu catatan kita. Saya pikir ini apakah itu nantinya mesin ATM itu adalah bentuknya anggarannya dari Kementerian dan isinya dari CSR dari BUMN yang ada. Saya pikir kita fokus pada persoalan mengapa mesin ATM itu tiba-tiba diputuskan dan direalisasikan oleh Kementerian tanpa persetujuan oleh Komisi IV.

Demikian Pak Ketua,

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.

Jadi Pak Sekjen sekali saya tanya, mesin ATM beras itu pakai anggaran APBN Kementerian Pertanian. Betul tidak?

Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Siap Bapak.

KETUA RAPAT:

Pembelian mesin ATM menggunakan dana APBN Kementerian Pertanian. Betul?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Betul Bapak. Dari dana Badan Litbang.

KETUA RAPAT:

Oke. Karena tadi Pak Sekjen bilang yang pertama, rekamannya ada itu CSR. Sekarang bilang pakai APBN.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Maksudnya CSR yang berasnya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya selanjutnya Pak Dedi Mulyadi.

Silakan Pak Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

**Pak Ketua yang saya hormati, Sekretaris Jenderal, para Dirjen,
Para Anggota yang saya hormati, para Wakil Ketua.**

Yang pertama ngomong ATM. ATM itu tidak efektif. Karena saya barangkali dulu ketika saya menjabat Bupati paling pertama menggulirkan ATM beras. Itu prosesnya lama, harus dipasang dulu, kemudian harus pakai PIN, dan orang-orang tua itu susah juga dikasih tahu nomor PIN-nya. Nah sebenarnya kita ini tidak usah ego sektoral. Kalau ingin mendorong masyarakat untuk mendapatkan beras dengan cepat apa susah, sih misalnya kerjasama dengan Bulog untuk didorong agar berasnya terdistribusi. Tidak mesti lagi bikin program-program baru karena di Bulog sudah ada perangkat-perangkat yang mengantar sampai kerumahnya dengan baik. Nah salah satu problem dari Indonesia itu adalah antar kelembagaan punya ego tersendiri, ingin menonjol dirinya masing-masing. Sehingga aspek *team work* nya menjadi tidak terlihat, problem masyarakat menjadi tidak cepat terselesaikan, ini harus segera dibenahi.

Kemudian yang kedua, kalau bicara persoalan postur hari ini penanganan covid bahwa Kementerian Pertanian ini sebetulnya memiliki perangkat yang sangat sempurna. Nah seluruh perangkat sempurna itu karena dia punya produk. Nah problem hari ini adalah apa, misalnya begini orang butuh kebutuhan pokok, tapi pasar tutup. Karena pasar induknya tutup harga-harga yang diproduksi oleh para petani jatuh. Beras hari ini jatuh harganya. Kemudian hasil hortikultura juga jatuh harganya dipasaran karena distribusi produknya tidak berjalan. Sehingga terjadilah krisis dikalangan para petani. Bagaimana caranya agar uang dari Kementerian ini muter tidak kemana-mana. Menurut saya gampang. Caranya bagaimana? Buruh tani hari ini dia punya beras karena habis panen tetapi dia tidak punya ayam. Ya sudah saja beli ayam dari peternak itu, kemudian yang hari ini kelebihan produk kasih ke buruh tani. Kemudian para peternak hari ini punya ayam tetapi dia tidak punya duit untuk beli beras. Peternak ayamnya dikasih beras.

Begitu juga para petani cabe dan sejenisnya. Ini yang harus dilakukan antar kelembagaan sehingga uang ini muter diantara lingkungan masyarakat dan kemudian seluruh produk berputar karena ini produk pertanian harus diselamatkan.

Nah kemudian problem yang berikutnya hari ini adalah, dari dulu harga tebu selalu jatuh. Sehingga para petani tebu merugi dan banyak yang berhenti menanam. Tetapi harga gula terus menerus naik. Berarti kan ada problem dalam regulasi pengelolaan semuanya. Untuk itu agar penanganan dampak wabah ini bisa cepat selesai antar kelembagaannya disinkronisasi, bicara dari hati ke hati dengan 2 hal. Yang pertama adalah penanganan kebutuhan mendasar hari ini. Yang kedua tentunya juga ketika nanti musim hujan lagi tetap kebijakan-kebijakan untuk menanam dalam jangka panjang harus dilakukan.

Nah yang terakhir termasuk juga ayam. Saya ini pengalaman ngurus ayam, mau ayam kampung, mau ayam kota kek, sama, selalu gagal. Beda dengan ngurus kambing dan sapi. Tingkat kegagalannya jauh lebih rendah dibanding dengan ngurus ayam.

Nah hari ini harus segera diubah. Jangan melakukan terus produk-produk yang gagal. Apalagi kalau dikasih ayamnya anaknya. Itu jangankan hidup, baru naik truk, itu nanti sudah mati itu. Nah inilah yang harus segera dibenahi dalam regulasi pengelolaannya, sehingga Kementerian Pertanian yang mitra kerja Komisi IV ini bisa secara cepat menyelamatkan buruh tani, secara cepat menyelamatkan para peternak yang gagal. Dan khusus ini untuk Dirjen Peternakan dan kesehatan hewan coba diskusi dengan ketahanan pangan. Ini praktek dilapangan begini, areal sawah itu banyak digunakan untuk peternakan. Saya punya beberapa tempat sudah saya study. Apa yang terjadi? Peternakannya jatuh, gagal, sawahnya gagal karena banyak tikus. Nah ini segeralah dibuat regulasi, ditata kembali agar seluruh areal ini satu sama lain saling mendukung, bukan saling membunuh. Diperlukan apa? Diperlukan pada Dirjen, pada Direktur sekali-kali turun ke lapangan, ketemu dengan para petani langsung tanpa harus melalui jalur protokoler agar kita mengerti masalah yang terjadi dibawah. Kalau kita memahami Indonesia dibalik layar sampai kapan pun nanti kita hanya bahagia di WTP. Itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau turun ke lapangan nanti Pak Dedi Mulyadi mendampingi. Tapi kalau para Dirjennya kalau kelapangan nanti sepatunya kotor. Jadi tidak usah ke lapangan. Cukup di kantor terima laporan saja.

Selanjutnya Pak Made Urip. Sudah siap Pak Made?

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Siap Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

Rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati.
Para Wakil Pimpinan, Bapak Sekjen Pertanian, demikian juga para Dirjen.
Dirjen Perkebunan, Hortikultura, Peternakan hewan dan juga Kepala Badan
Pertahanan Pangan,

Pertama, (rekaman kurang bagus).

KETUA RAPAT:

Pak Made tidak kedengaran. Sinyalnya jelek. Nanti lagi ya?

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Sudah Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya lanjut.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Ya jadi Tahun'98 itu (rekaman kurang bagus) cukup mampu memberikan sumbangan terhadap perekonomian kita, baik itu vanili, kelapa sawit, kakao, kopi dan lain sebagainya.

Nah saya ingin menyampaikan kepada Bapak Dirjen di perkebunan ini, bagaimana kita sekarang dalam kondisi seperti karena bukan pertanian saja yang anggarannya dipotong hampir semua (rekaman kurang bagus) kunjungan spesifik itu akan menjadi mimpi saja. Nah saya berharap kepada Pak Dirjen Perkebunan tentang pembenihan benih ini harus menjadi kenyataan dilapangan. Baik itu kakao, kopi, kemudian juga yang lain-lainnya supaya bisa menyelamatkan dirinya para pekebun kita, terutama perkebunan rakyat kita di lapangan ini. Nah jadi misalnya juga ada program Desa Mandiri Benih misalnya, itu mampu memberikan kontribusi terhadap pekebun kita terutama perkebunan rakyat ini. Maka itu terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Dirjen Perkebunan itu perlu terus kita dorong, misalnya disini pengembangan area kelor misalnya itu cukup bagus. Karena daun kelor sekarang dalam kondisi begini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya didalam kondisi seperti *lockdown* ini.

Nah yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Dirjen Hortikultura. Nah Dirjen Hortikultura ini kan mestinya harus aktif juga untuk menghidupkan kembali yaitu tanaman obat ini bio farma ini, karena sangat dibutuhkan sekarang ini. Jadi (rekaman kurang bagus) tetapi saya yakin Pak Dirjen Hortikultura ini sudah punya konsep yang cukup matang untuk disampaikan nanti atau dilaksanakan dilapangan dalam rangka untuk menghadapi covid-19 ini.

Nah yang ketiga untuk teman saya, saudara saya Pak Dirjen Peternakan ini kondisi para peternak kita dalam kondisi sampai saat ini betul-betul memprihatinkan. Misalnya di ayam, pakannya sudah harga mahal, kemudian harga ayam jatuh. Nah ini betul perlu diperhatikan terutama peternak rakyat yang bergerak di komoditas ayam ini.

Babi sekarang ini kondisinya betul-betul sulit. Hampir peternak babi ini kondisinya sangat kritis. Babinya mati semuanya. Nah ada program yang ingin disampaikan oleh Pak Dirjen Peternakan yang perlu terus didorong terhadap daerah-daerah yang memang menjadi basis peternakan babi itu, seperti Papua, Sulawesi Barat, misalnya Bali itu perlu diperhatikan. Apalagi Bali pada kondisi pada saat sekarang ini menghadapi dunia pariwisata tingkat universal hotel zero. Semua pekeja hotel itu sekarang kehilangan pekerjaan. Maka itu perlu didorong substitusi dari pekerjaannya ini berupa dorongan untuk beternak beberapa peternak rakyat, terutama kelompok-kelompok tani yang ada di desa itu perlu dihidupkan Pak Dirjen.

Program covid ini terutama kondisi sosial ekonomi masyarakat cukup memprihatinkan pada saat sekarang. Maka itu saya berharap kepada Pak Dirjen dan semuanya yang hadir pada kesempatan berbahagia ini lakukan program-program yang konkrit, yang riil yang bisa menyelamatkan yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat sekarang ini. Itu. Jadi jangan berpikir tentang yang besar-besar dululah. Yang aktif-aktif dilapangan itu yang perlu dilakukan.

Dan yang terakhir yang keempat, kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Saya berharap diversifikasi pangan ini perlu dihidupkan kembali secara terus menerus Pak Kepala Badan Pak Agung. Jadi kondisi pangan lokal itu perlu lagi digali. Itu perlu dihidupkan. Karena terus terang saja dampak Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan nasional kita pada saat sekarang ini.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Made. Signalnya jelek. Tidak jelas.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Kita bergantung pada pangan impor karena hampir semua negara itu akan memproteksi pangannya. Itu barangkali Pak Ketua, saya berharap kepada Pak Agung sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan jangan memberikan laporan ABS kepada Presiden, kepada Pemerintah ini. Laporkan apa adanya yang real yang konkrit tentang kondisi pangan kita pada saat sekarang ini.

Nah itu barangkali Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dan Pak Ketua supaya tetap sehat wal'afiat. Saya memberikan acungan jempul ini kepada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Made Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Slamet dari Sukabumi.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kepada Pak Ketua, serta rekan-rekan Anggota Dewan beserta Pak Sekjen.

Pertama Pak Ketua, ini saya memberikan catatan dan menjadi perhatian kita semuanya, jangan sampai mitra kita menjadi telat yang baik terkait dengan pengelolaan tata kelola Pemerintahan. Saya khawatir *good governance* dan *good government*-nya ini kurang bagus Pak. Karena ini sistem anggaran masih dibicarakan. Ini catatan saya pertama terkait, jangan sampai mitra kita jelek dalam hal ini. Kita harus mengingatkan itu. Anggaran masih berjalan, sudah ada program ini, program itu disampaikan ke media dan lain-lain. Ini tentunya akan menjadi *precedent* yang kurang baik dalam tata ketatanegaraan kita sehingga kedepan tentunya ini menjadi catatan berat bagi kita. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga menyoroti hal yang sama tadi Pak Ansy lema terkait dengan Dirjen Perkebunan. Disitu ada anggaran cukup besar terkait dengan pengembangan basis data. Ini *se-urgent* apa itu kemudian dipertahankan untuk itu terkait kalau ini penanganan covid. Sehingga usul saya perlu dialihkan menjadi program-program yang memang realistis yang tadi banyak disampaikan oleh teman-teman.

Kemudian juga terkait dengan program kelapa genjah, Hitungan secara lapangan kan antara 3 tahunanlah baru berbuah. Kalau ini menjadi program unggulan terkait dengan penanganan covid. Hubungan dengan penanganan covid ini saya pikir tidak ada korelasi yang, Karena kita dibagi sekarang 3 tahun akan baru berbuah ini. Sementara saya lihat anggarannya juga cukup besar ini Rp16,5 Miliar. Ini juga perlu kita koreksi atau kita analisa bersama. Fasilitasi operasi pasar juga itu cukup besar 4,8. Hanya ini kita tanyakan koordinasi ekspor dan fasilitasi itu hubungannya dengan covid itu dimana. Nanti mungkin bisa dijelaskan Itu dengan Dirjen Perkebunan.

Terkait dengan PKH. Sebelum masuk ke anggaran, saya juga tadi ini sudah diumumkan mau beli ayam rakyat dan lain-lain, nah ternyata

anggarnya juga seperti itu. Nah terkait dengan itu saya menyatakan juga bantuan ayam lokal yang Rp26,9 Miliar itu, saya *Insha Allah* berani memastikan bahwa program ini akan tidak banyak memberikan manfaat kalau tidak mau dikatakan gagal kalau ini terus dijalankan sehingga dana yang sekian itu dalam rangka penanganan covid mungkin perlu dialihkan langsung kepada penanganan covid. Karena saya mau ngomong begini, saya pelaku bisnis ayam, saya juga tahu produksi sehingga apa yang disampaikan oleh Dirjen PKH tadi itu juga saya akan tanya data dari mana yang kemudian kesiapan perusahaan-perusahaan untuk siap menyerap dari ayam-ayam yang ada hari ini.

Saya kenal beberapa, bagaimana dia bisa menyerap ayam kayak Janu Putro, kayak patriot, kayak GL tri kencana, dia itu juga menjadi korban dari dia punya ayam banyak, bagaimana dia bisa menyerap yang lain. Kalau masih memungkinkan. Saya sebut kayak Java, kayak apa yang lain itu yang perusahaan-perusahaan besar itu mungkin saja melakukan penyerapan. Nah makanya data 22 itu saya juga ini data sebagian saya yakin abal-abal. Saya tahu bagaimana Janu Putro. Saya kenal pemiliknya, bagaimana dia bisa menyerap. Sementara dia sendiri untuk mengeluarkan ayamnya berat. Nah ini tolong diperbaiki datanya, Secara saya juga menjadi pelaku itu sehingga tahu bagaimana kondisi itu.

Sebenarnya kalau kita bicara teknis keluar dari anggaran, ini tidak akan terjadi kalau Dirjen PKH dari awal kemudian mengikuti saran daripada peternak. Mulai dari pembatasan GPS-nya, mulai dari, Ini tidak akan pernah terjadi kemudian terjadi *over supply* yang seperti ini. Nah ini catatan kita, Kita akan dalam lebih dalam setelah mungkin pembahasan anggaran ini. Jadi itu mungkin terkait dengan data yang disampaikan. Saya bilang ini mungkin data abal-abal, jangan sampai tadi disampaikan oleh teman-teman ABS ya.

Kemudian juga rencana aksi PKH itu juga luar biasa. Jadi dananya, bantuan dukungan penyediaan ternak ini hanya 3 Miliar sementara untuk *safety* tadi sudah ditanyakan oleh beberapa teman. Intinya kita ingin mempertanyakan komitmen yang akan, bantuan kepada peternak atau petani di Dapil kita seberapa berkurang.

Itu saja mungkin Pimpinan yang mungkin ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Slamet.

Saya juga dapat laporan yang PT The Horse atau Universal itu sudah tidak mungkin menyerap. Jadi Pak Dirjen PKH lanjutkan data-data yang fiktif jangan sampai tidak. Anytime saya bisa ngecek karena ada salah satu petinggi di perusahaan tersebut saya kenal, bahkan mereka sendiri mengeluh. Bagaimana mau menyerap, 1 juta ekor *ini-ini-ini*, orang mereka itu

tidak punya rumah potong hewan kok Universal atau The Horse itu. Bagaimana mau menyerap 1 juta ekor. Hal yang tidak mungkin saja.

Selanjutnya Ibu Endang. Bu Endang sudah siap Bu Endang? Kalau Bu Endang tidak ada, Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Siap.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bang.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua yang luar biasa.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Dirjen, dan jajaran Kementerian Pertanian.

Pertama, tentu kalau prihatin ya prihatin kita karena pemotongan anggaran sangat besar Pak Sekjen ya.

Pertama mungkin saya soroti dulu berkaitan dengan Dirjen Perkebunan. Tentu tadi sudah banyak teman-teman menyoroti.

Pertama Pak Dirjen berkaitan saya lihat disini logistik benih, itu kurang lebih dari sekian Miliar tinggal Rp255 Miliar. Kalau kita lihat dalam konteks ini kan semua adalah konteks pengadaan Pak Dirjen, semua pengadaan, semua buat kepentingan petani. Tapi saya belum melihat, ini mungkin pola penganggaran di Dirjen ini seperti apa saya belum lihat ini bagaimana. Harusnya kan kita mencari solusi buat petani. Pertama misalnya kita lihat disitu ada dan macam-macam. Saya belum melihat bagaimana sih sebenarnya memberi solusi buat petani, misalnya bagaimana membeli mereka, semua program-program ini lebih kepada pengadaan. Ini mungkin perlu diperbaiki oleh Pak Dirjen Perkebunan.

Yang kedua berkaitan dengan saya lihat disini padat karya perkebunan. Disini kurang lebih sekitar Rp11,9 Miliar, Ini salah satunya adalah untukantisipasi persoalan termasuk PHK dan lain-lain. Ini juga sebenarnya program ini bagus, Cuma seperti apa ini harus digambarkan Pak Dirjen. Jadi anggaran yang sedemikian ini harus betul-betul tepat sasaran. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Suhardi, Pak Ansy Lema Jadi artinya anggaran ini ada keterpihakan. Hari ini rakyat lagi susah, hari ini rakyat lagi lapar, apa program-program yang betul-betul menyentuh langsung kepada masyarakat. Contoh yang ketiga berkaitan dengan kelapa genjah tadi, Ini sekitar Rp16 Miliar. Menurut saya ini belum ada urgensi disini Ini juga harus butuh waktu 3 sampai 4 tahun. Kita berharap dengan program-program

seperti ini lebih baik didorong bagaimana mencari solusi petani membeli hasil mereka Jadi mereka tertolong, Nah ini mungkin menjadi perhatian.

Kemudian masalah Dirjen Hortikultura Disini saya lihat dalam rangka penanganan covid-19. Saya melihat disitu, itu hanya Rp5 Miliar disiapkan buat bantuan khususnya bantuan sosial kepada petani-petani padahal transportasi Rp9 miliar. Ini perlu mungkin Pak Dirjen Hortikultura dalam konteks ini bagaimana bantuan-bantuan kepada masyarakat ini lebih diprioritaskan dulu. Ini lebih mahal transportasinya ketimbang bantuan langsung kepada masyarakat ini penting Pak Dirjen, ini menjadi catatan tersendiri.

Kemudian ketiga Pak Dirjen PKH, saya melihat disini ini perlu dievaluasi kembali termasuk juga menyangkut pengadaan ayam lokal dan lain-lain. Memang kalau kita peruntukan buat petani miskin segala macam tapi seperti apa ini. Ini pengadaan-pengadaan ayam ini harus betul-betul jelas sehingga solusi yang cepat buat kepentingan masyarakat.

Terakhir saya pikir buat ketahanan pangan ini Pak Ketua, Pak Dirjen ya. Salah satu yang saya soroti masalah gula Pak, masalah importir gula ini khusus ketahanan pangan. Kita sampai hari ini, terus terang ini harga gula di masyarakat itu rata-rata 19 sampai 20 Ribu, Artinya ini bukan setahun, dua tahun. Tentu dalam hal ini harus ada langkah-langkah konkrit Pak, termasuk masalah hak impor juga. Padahal kalau kita mau jujur produk gula di Indonesia kalau ini bisa di *back up* oleh Kementerian Pertanian, kita tidak harus impor lagi Pak Sekjen. Ini menjadi catatan bahwa ketika persoalan Ramadhan, Idul Fitri ini menjadi masalah-masalah selalu.

Ini mungkin Pak Ketua beberapa hal.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muslim.

Selanjutnya Pak Sutrisno. Silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

**Pak Ketua,
Pak Sekjen,
para Eselon I,**

Selama ini saya dalam rapat-rapat menggunakan bahasa formal. Nah nampaknya belum bisa direpson sepenuhnya, saya akan menggunakan bahasa siloka dulu nih Pak Sekjen. Jadi DPR RI sama Kementerian ibarat suami sama istri. Suaminya yang berikan belanja kepada istrinya. Sudah

barang tentu menjadi haknya memberikan menu apa yang dilakukan, dan juga menyarankan apa yang mesti harus dilakukan. Jadi menjadi kewajiban bagaimana mungkin kalau istri tidak memperhatikan kehendak sang suami. Mohon untuk bisa dipahami ini.

Kedua Pak Sekjen, rapat kemarin Pak Sekjen mengatakan bahwa di Sekretariat Jenderal ada anggaran Rp1,3 Triliun untuk belanja gaji. Jadi semua Eselon I termasuk yang hadir ini, itu belanja pegawainya masih cukup tinggi. Artinya itu belanja pegawainya masih cukup tinggi, Artinya Pak, itu bukan belanja *fix cost* sebagai gaji pegawai ada belanja kegiatan di kegiatan. Belanja pegawai di kegiatan karena postur APBN itu ada 2 belanja pegawai, belanja gaji dan belanja pegawai untuk kegiatan. Bentuknya apa? Honorarium, satuan satu, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Mohon untuk dikaji kembali, uangnya tidak dikemana-mana untuk menutupi anggaran-anggaran yang sangat dibutuhkan tapi kebutuhan itu terpotong lebih besar, diantaranya tadi di Dirjen Tanaman Pangan, PSP dan sebagainya.

Kemudian yang ketiga Badan Ketahanan Pangan, Pada situasi kondisi covid-19 ini seharusnya Badan Ketahanan Pangan yang menjadi bintang. Karena persoalan mendasar adalah bagaimana menyiapkan penguatan pangan, menjaga rakyat tidak kekurangan pangan. Namun apabila kita cermati pada kegiatan yang ada programnya justru tidak jelas, melalui proses. Manakala terjadi sesuatu rakyat pasti akan kelaparan. Yang ada ini hanya kegiatan pemantauan dan pemetaan pangan. Rp29,175 Miliar di halaman 4 ya anggarannya. Kemudian program rame-rame, ini hampir ada pada semua di Direktorat Jenderal. Apa itu? Fasilitasi distribusi pangan, Ini saya katakan program rame-rame Semuanya menganggarkan untuk itu. Ada anggaran di Badan Ketahanan Pangan Rp50 Miliar dari Rp176,5 Miliar. Ini juga perlu dikaji kembali, perlu dialihkan Untuk hal yang sangat penting menyiapkan kesiapan pangan bagi rakyat.

Kemudian lumbung pangan masyarakat terima kasih sudah dianggarkan. Cuma hanya Rp300 dari anggaran 15,5 Miliar, masing-masing Rp50 Juta. Saran saya agar diperluas ini. Inilah cadangan penguatan pangan rakyat agar sewaktu-waktu terjadi sesuatu di tempat itu dapat segera ditangani dari beras atau pangan yang ada di lumbung-lumbung pangan rakyat. Kalau Rp50 Juta akan bisa 10 ton, cukuplah 2-3 ton, yang lainnya bisa didorong oleh masyarakat untuk menambahkan sehingga punya cadangan yang kuat di tiap-tiap daerah itu.

Kemudian di Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pak Dirjen dalam RDP yang lalu sudah ada kesepakatan. Dalam rangka penguatan kekuatan ekonomi rakyat lapis bawah supaya juga kebutuhan protein hewani juga terpenuhi, rakyat punya kehidupan. Kita sepakat untuk memberikan Bansos baik sapi, maupun kambing atau domba. Setelah penghematan ini anggaran itu sirna entah kemana. Yang ada hanya 3104 ekor domba, Rp49,78 Miliar Nomor 13 Pak Dirjen, kambing domba 5000 ekor Rp16,25 Miliar.

Pak Ketua, mohon agar anggaran yang sudah disepakati bersama ini, kami sudah janji dan ini semua relasinya sangat kuat di situasi covid-19 ini sangat kuat untuk menangani covid-19. Anggarannya dikembalikan, anggarannya bisa dari nomor 10 itu ada 3.536.307 sektor dengan Rp303,98 Miliar. Populasi ternak yang dilaporkan 17,5 Juta sapi potong. Sapi perah hanya 0,61 juta atau 610.000. Artinya apa? Bisa dikurangi anggaran ini untuk dialihkan kepada apa yang telah disepakati bersama. Kemudian dari ayam lokal yang tadi disinggung oleh Pak Ketua Nomor 15a itu. Ada anggaran Rp26,96 Miliar. Ada DIPA yang awal harga satuannya hanya sekitar Rp62.000. Di anggaran sekarang dianggarkan Rp700.000 lebih, mestinya anggaran dikembalikan pada anggaran DIPA, manakala ini dikoreksi akan terjadi pengurangan anggaran Rp24,7 Miliar.

Kemudian di Nomor 22 itu ada anggaran normal standar pedoman dan kriteria Direktorat Teknis. Ini Rp44,5 Miliar, apakah juga ini sangat mendesak untuk dilaksanakan Pada kondisi bangsa atau yang seperti ini. Kami usulkan untuk segera dialihkan manakala tidak sangat mendesak.

Kemudian Direktur Jenderal Horti, Pak Dirjen kebetulan wilayah saya Majalengka penghasil sayur mayur, sebagaimana tadi Pak Dedi sampaikan, karena pasar induknya tutup sehingga sayur mayur itu menjadi membusuk. Oleh karenanya usulannya adalah bagaimana Dirjen Horti membuat jalur distribusi agar barang-barang sayur mayur itu bisa masuk kepasar.

Yang terakhir Pak Ketua, mesin ATM. Saya mensinyalir program ini sudah dijalankan sebelum anggaran ditetapkan, karena bicara mesin ATM 2 hal yang dipenuhi. Satu *hardware*-nya, dan satu *software*-nya. Mana mungkin dalam waktu 3 bulan sudah bisa selesai. Dimana bisa membuat mesin ATM khusus beras ini. Oleh karena usul saya, sebaiknya Komisi IV salurkan saja ke BPK untuk mengeceknya bagaimana proses yang dijalankan dalam.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Kang Haerudin.

Singkat, jelas, jangan muter-muter Kang.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Siap Ketua.

Terima kasih Ketua.

**Ketua yang terhormat,
Anggota Komisi IV yang terhormat,
Pak Sekjen beserta para Dirjen yang hadir pada Rapat Virtual siang hari
ini yang saya hormati.**

Pertama Pak Ketua beserta Pimpinan, tentu kita sampaikan ke Pak Sekjen bahwa apa yang kita sepahami antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian tidak menjadi titik objek yang disisir. Yang kita lihat dari skema anggaran itu kesepakatan kita itu yang banyaknya disisir sehingga berkurang. Yang seharusnya banyak anggaran yang lain yang lebih jauh untuk bisa disisir. Contoh apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Pak Sutrisno tadi bahwa ternyata yang besar-besar itu tidak disisir. Saya curiga bahwa ada permainan pihak ketiga yang begitu kuat yang seolah-olah Kementerian tidak mau berubah atau ada di internal Kementerian yang memang menari disitu dan tidak mau diganggu walaupun kondisi seperti ini.

Kedua Ketua, ingin kami sampaikan dari Fraksi PAN ini. Pak Sekjen beserta para Dirjen, program hari ini adalah program besok Indonesia selamat dari kelaparan. Programnya instan, cepat dan terukur. Jadi memang itu harus diproyeksikan. Saya sampaikan Pimpinan, saya usulkan Pak Sekjen mohon disisir ulang seluruh apa yang telah disampaikan pada hari ini. Nanti pada rapat selanjutnya kita akan lihat keberpihakan kita kepada kondisi wabah dunia yang hari ini melanda kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi keberpihakan kita juga pada bangsa kita agar selamat dari kelaparan. Pak Sekjen ukur minggu ini apa yang bisa kita berikan pada bangsa agar tidak lapar. Bulan depan apa yang kita berikan kepada bangsa kita agar tidak kelaparan, termasuk sampai pada titik kita tentukan, taruhlah apa yang Pak Jokowi tentukan bahwa sampai akhir 2020. Ini musim wabah ini sebagai garis, kita tentukan apa saja program-program yang bisa kita sepakati, kita canangkan agar Indonesia aman pangannya. Karena tugas Kementerian Pertanian adalah menjadi basis utama pertahanan pangan kita.

Terima kasih Pak Ketua. Cukup itu yang kami sampaikan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam Kang Haerudin.

Selanjutnya Mbak Maria Lestari.

Silakan Mbak.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Selamat siang kepada kita semua,
Salam sejahtera kepada kita semua.
Pimpinan Rapat, para Wakil Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi IV yang terhormat,
Jajaran Pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang saya hormati,**

Terkait dengan kegiatan Dirjen Perkebunan yaitu pengembangan basis data *special*. Nah peningkatan sistem informasi perkebunan berbasis web android dan pemutakhiran sistem komunikasi dan pengolahan data sebesar kurang lebih Rp79 Miliar. Kami mohon penjelasan secara rinci rasional dan proporsional, apa urgensi dari kegiatan tersebut dengan anggaran sebesar itu dalam kondisi pandemi covid-19 ini, mohon penjelasan dampak konkrit dari kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan produksi dan kesejahteraan petani kita, nah menurut hemat kami banyak kegiatan lain yang lebih produktif dan lebih menyentuh langsung serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani kita yang mestinya harus dipikirkan dan dilaksanakan secara serius oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah informasi, di Kalimantan Barat berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2019, Kalimantan Barat (suara terputus masalah jaringan).

KETUA RAPAT:

Mba Maria di pending dulu. Selanjutnya Pak Bagus Adhi yang sudah lama tidak terlihat, semoga tambah bagus.

Silakan Bli.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Siap Ketua.

Mohon ijin.

Yang saya hormati Ketua Komisi IV dan Pak Sekjen dan Dirjen yang hadir,

Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sudah disampaikan oleh senior saya Pak Made Urip, dan juga Kang Dedi Mulyadi. Namun saya akan mempertegas kembali, tidak ada salahnya saya mempertegas kembali.

Pertama, adalah saya ingin menyuarakan atau memperjuangkan keluhan petani cengkeh dan tembakau yang ada di Bali yaitu dengan diterbitkannya PMK RI Nomor 152/PMK/010/2019. Dari diterbitkannya PMK tersebut memang terjadi penambahan pendapatan cukai sebesar Rp125 Triliun, namun ironisnya harga cengkeh dan tembakau kita dari 100.000 turun menjadi Rp60.000, dan inilah yang menjadi jeritan para petani kita pada saat covid seperti saat ini. Usul konkritnya, mohon Pak Sekjen, dan Dirjen terkait agar berkoordinasi dengan Menkeu terkait dengan keluarnya PMK ini. Dan juga bila memungkinkan untuk pencapaian kesejahteraan petani kita agar PMK ini dicabut. Sehingga tidak ada lagi permainan-permainan oleh para pengusaha kita dengan dalih karena naiknya cukai maka harga beli di petani tidak bisa maksimal. Itu yang disampaikan oleh para pengusaha kita.

Yang kedua adalah terkait dengan ATM beras. Nah ini janganlah memberikan konflik yang lebih tajam lagi. Saya baca di beberapa media. Pak Mentan menyampaikan bahwa akan didirikan ATM beras di Kodim atau

Polda. Nah ini apa betul atau salah, kurang tahu saya. Jadi kalau memang itu betul, tolong diurungkan karena itu akan memberikan petaka dalam kondisi seperti ini karena menimbulkan kesenjangan lebih tajam.

Yang ketiga, kepada Pak Dirjen Kesehatan Hewan terkait dengan covid-19 ini. Peternak kita yaitu khususnya di ayam petelor, sekarang telurnya buat produksi, namun daya beli masyarakat tidak ada. Alangkah lebih baiknya hasil peternak ini kita beli dan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga dipeternak babi. Sekarang malahan jadi pesta babi di Bali. Jadi dijual murah-murah karena mereka tidak mampu membeli pakan sehingga dijual murah-murah yang walaupun kenyataannya harga daging babi dipasaran tetap Rp50 sampai Rp60 ribu. Nah ini perlu langkah-langkah konkrit dari Kementerian dan Pemerintah sehingga hal-hal ini tidak terjadi lagi.

Begitu kira-kira Pak Ketua. Ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Mohon jawaban langsung dari Pak Sekjen terkait dengan usul dan saran saya yang Nomor 1 yaitu terkait dengan PMK RI Nomor 152/PMK 010/2019.

Terima kasih.

Semoga sehat semuanya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bli Adhi.

Selanjutnya Pak Bambang Purwanto.

Silakan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Pak Saya Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Bambang dulu Ibu Maria, Pak Bambang dulu. Silakan Pak Bambang.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan (jaringan kurang bagus).

KETUA RAPAT:

Pak Bambang dipending dulu.
Mbak Maria sudah bagus signalnya bisa, silakan kalau sudah bisa.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Baik.

Terima kasih Pak. Maaf, sinyalnya sedikit buruk disini.

Nah informasi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2019, Kalimantan Barat merupakan Provinsi dengan lahan kelapa sawit terluas ke-3 dengan luas 1,8 juta hektar, Sumatera yang ke-2 dengan luas 2,1 juta hektar, dan Riau yang pertama dengan luas 3,4 juta hektar.

Namun Kalimantan Barat masih menjadi daerah termiskin diantara Kalimantan lainnya. Data terbaru Dinas Perkebunan Kalimantan Barat untuk bulan April, harga kelapa sawit 1471. Nah dengan kondisi seperti ini harga beli sampai di masyarakat kurang lebih 1000 per kilo. Nah sedangkan untuk harga karet juga mengalami penurunan yang sangat drastis, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Sedangkan anggaran dari program Badan Ketahanan Pangan yakni pertama penguatan pasokan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan yang semula anggarannya adalah Rp238 miliar 207 dipangkas menjadi Rp176 miliar.

Nah kedua, penguatan toko tani Indonesia semula anggarannya Rp682 miliar menjadi Rp26.443.420 miliar. Ketiga, penguatan cadangan dan lumbung pangan masyarakat semula anggaran Rp17 miliar 225 menjadi Rp15.526.200 Miliar. Dari pemangkasan yang sangat besar anggaran tersebut, apakah bisa menjamin stabilitas harga hingga stabil dan apakah toko tani sejauh ini (sinyal kurang bagus) toko tani tidak mendukung dengan fasilitas yang ada serta pangan sampai sejauh ini masih sangat mengalami kekurangan.

Sehingga saya menyarankan agar pemangkasan anggaran tersebut juga harus didasari juga dengan output yang dihasilkan dan tidak melakukan pemangkasan anggaran yang tidak bermanfaat, serta untuk program yang tidak menyentuh masyarakat dan petani. Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Maria.

Selanjutnya Mbak Nur'aeni. Silakan. Mba Nur'aeni ada?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik.

Terima kasih Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua yang saya hormati beserta teman-teman,
Pak Sekjen, Dirjen, dan Kepala Badan.

Langsung melihat dari struktur, dari realokasi dan refocusing dari Kementerian Pertanian dari beberapa Dirjen serta Badan, saya melihat bahwa belum cermat serta belum terukur dan terarah dalam melakukan realokasi dimasing-masing Dirjen serta Badan. Mengapa saya katakan demikian? Karena masih banyaknya program yang tumpang tindih. Berarti lemahnya koordinasi serta program yang terintegrasi antara Dirjen satu dengan Dirjen yang lain serta Badan yang lainnya, contoh misalnya pemberian bibit ayam. Ini juga sudah ada diprogramnya PKH, masuk juga di Badan Litbang. Belum lagi program toga, masuk di Balitbang juga masuk ke Dirjen Hortikultura. Tentu ini sangat disayangkan, Kenapa tidak dilakukan pergeseran untuk bisa diberikan kepada program yang bermanfaat serta bantuan yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Yang kedua, saya ingin menyoroti dari Dirjen PKH kaitan dengan jumlah setting telur dalam periode 15 Maret sampai 11 April ini. Nah bagaimana strategi yang akan dilakukan mengingat bahwa setting telur ini mengalami penurunan setiap minggunya. Sementara telur itu kan menjadi konsumsi yang besar di masyarakat kita. Dengan berkurangnya produksi telur yang ada di kita tentu akan meningkatkan harga telur menjadi tinggi. Nah ini juga menjadi problem. Mohon kepada Dirjen PKH untuk menjelaskan, strategi kedepan seperti apa.

Berikutnya dari Dirjen Perkebunan, saya melihat adanya program pengembangan sertifikasi dan pengawasan perbenihan serta proteksi tanaman perkebunan modern. Pertanyaan saya, perkebunan modern yang seperti apakah yang akan diberikan program-program dari PKH ini, dan apakah memang perkebunan kita sudah banyak yang memiliki sistem modernisasi untuk perkebunan. Kalaupun ini belum urgensi untuk bisa dilakukan, saya juga mohon untuk dipertimbangkan agar di realokasi ke kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Terakhir, saya menyoroti dari kegiatan dari Badan Pangan, Sebetulnya pangan ini merupakan Badan yang cukup vital dan cukup strategis untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat saat ini kaitan kebutuhan pasokan pangan. Tapi melihat dari sisi perencanaan realokasi, dimana ada anggaran yaitu lembaga distribusi pangan atau PTIC yang maksud tujuannya disini memotong rantai pasok stabilitas harga dengan anggaran yang cukup fantastis 84 Miliar. Saya ingin tanyakan, ini lembaga mana yang akan ditunjuk, apakah tujuan memasok, memotong mata rantai ini akan memang

menjamin untuk bisa memutus mata rantai yang ada pada saat ini, Mohon penjelasan. Mungkin itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Mbak Alien Mus. Silakan Mba Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan juga Anggota Komisi IV yang saya banggakan.

Yang saya hormati Pak Sekjen, Dirjen, serta jajarannya,

Saya mohon maaf saya ingin menyampaikan bahwa kita saya lihat di Kementan ini tiba saat tiba akal dan tidak ada. Akalnya ada tapi tidak tepat sasaran. Di masa pandemi ini tentunya kita melihat harusnya ada kepedulian Kementan sebagai garda depan seluruh rakyat Indonesia alias perut. Tapi semena-mena memotong anggaran tanpa ada spesifik dan transparansi juga penggunaan anggarannya.

Kita lihat disitu ada Badan Ketahanan Pangan, Tadi sudah disinggung oleh Bu Nur, Badan Ketahanan Pangan ini sangat prioritas pada saat ini. Kita, saya sudah sampaikan berulang kali bulan 4, 5, 6 ini adalah bulan masa panen, tapi di masyarakat atau para petani sekarang ada hasil taninya tapi tidak ada daya beli masyarakat karena memang tidak ada uang. Susah orang ini. Tadi sudah disinggung beberapa senior-senior terdahulu.

PKH juga, fokus penganggarannya bukan untuk peternak kecil. Ya Allah, subhanallah, ini model apa kita ini. Miris, Pak Sekjen miris, Penggunaan anggaran di Mentan di luar dari apa yang sudah disepakati oleh Komisi IV, ini bagaimana ceritanya penganggaran ini. Bagaimana pertanggungjawabannya Kalau berbicara soal ATM beras, memang Indonesia hanya disini di Pulau Jawa saja, Susah orang. Dalam keadaan seperti ini jangan memanfaatkan keadaan. Kita harusnya berbicara soal rigid, kita harusnya berbicara soal komoditi-komoditi, petani disetiap daerah atau disetiap Provinsi. Kita harus melihat Provinsi mana yang punya keunggulan, apa yang harus dipertahankan. Misalkan di Pulau Sumatera ada apa, ada gula misalnya di Jawa ada padi. Harus kita lihat itu prioritasnya. Belum juga kita sepakati dengan anggaran ayam sudah heboh beritanya. Sangat miris.

Nah kita sudah tidak bisa bicara lagi. Setiap kali rapat kita memberi *advice* kepada Kementan. Seharusnya Kementan pada saat ini bisa jangan

sampai ada pemotongan. Atau pun kalau ada pemotongan harus melihat skala prioritas dari dirjen-dirjen tersebut. Fokus penganggarannya ada dimana. Saya ingin melihat juga, Tadi sudah disinggung ada beberapa senior-senior tentang PKH, Badan Ketahanan Pangan, Perkebunan.

Saya melihat di Hortikultura juga ini. Ada anggaran di penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam. Ini bentuk kegiatannya seperti apa? Ada Rp15 miliar. Terus juga kita melihat ada peningkatan produksi buah dan florikultura, kawasan buah lainnya, Ada sekitar Rp7 miliar. Ini komoditasnya seperti apa? Ya Allah. Kita harus mempersiapkan jangan sampai memikirkan bahwa virus ini hanya Cuma 3 bulan. Maka dari itu Mentan harus memikirkan. Kalau memang anggarannya ini dipotong bagaimana petani-petani kita, peternak kita, bagaimana?. Kalau mau bicara anggaran kan rigit, harus fleksibel dan akuntabilitas, dan juga harus ada transparansi. Mengajukan anggaran juga ke Komisi IV hari ini kita memberikan advise Komisi IV memiliki acuan resume dari rapat, tapi tidak pernah juga diikuti. Tiba-tiba ada lagi anggaran yang baru. Ujug-ujug terbuka lagi kegiatan yang baru, yang tanpa kita sadari juga itu mungkin sudah dijalankan. Maka dari itu Ketua, saya harapkan setiap kontrak yang dilakukan oleh Kementan kita harus punya datanya. Apabila kontrak itu belum terealisasi dan bisa dipotong anggarannya, tolong dilihat kembali atau di refocusing lagi. Jangan sampai besok-besok kita dituntut pertanggungjawabannya yang kita sendiri tidak tahu. Dan saya berharap kita semua di Komisi IV kompak. Dan ini Ketua saya sampaikan kita juga sudah masuk bulan Mei, saya mengingatkan tanggal 12 Mei itu sudah selesai, kita harus Reses. Jangan sampai kita tunda, tunda, tunda dengan rapat yang tidak memiliki hasil.

Saya berharap ini adalah hari yang benar-benar menentukan kedepan Kementan harus bagaimana. Kalau memang kemarin sudah diberikan acuan tentang bagaimana untuk proses penganggaran di Kementan harus juga dilakukan lagi atau kita harus ambil langkah konkrit dari Komisi IV sebagai dampak bahwa kita benar-benar memperhatikan full untuk petani peternakan dan juga masalah pertanian, peternak dan juga masalah tentang pertanian di Indonesia.

Tolong jangan pernah kita mengambil kesempatan dalam keadaan ini. Rakyat sudah mulai susah. Tadi disinggung Pak Made Urip. Daging babi yang kemarin juga pernah saya ungkap bahwa ini juga menjadi permasalahan para konsumsi babi, tapi yang tidak transparansinya kita dari pakannya bahwa ada penyakit ini masyarakat tidak tahu. Kita berbicara soal daging kerbau, sudah jelas-jelas kemarin India tidak masuk dalam kategori penyakit mulut dan kuku Ketua ya kalau tidak salah. Tetap kita memaksakan untuk masuk daging tersebut dari India. Kemarin saya sempat lihat di CNN juga. Menteri Perdagangan menyatakan bahwa daging kerbau itu tetap akan masuk dan diprioritaskan oleh. Orang sekarang negaranya juga lagi *lockdown*. Bagaimana? Ketua, saya minta supaya konkrit saja Ketua. Saya pikir semua yang disampaikan oleh senior-senior sebelumnya yang sudah sangat konkrit dan sudah sangat jelas dan juga sangat memberikan *advise* yang luar biasa. Kalau tidak diikuti lagi Ya Allah.

KETUA RAPAT:

Oke Mbak Alien cukup.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir Mbak Riezky Aprilia Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Sekjen beserta Bapak Dirjen sehat Pak?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Alhamdulillah.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bapak sehat, kita yang tidak sehat Pak corona Bapak ini masalahnya Pak. Kita lama-lama stress juga melihatnya masalahnya. Kalau saya dari kemarin saya konsisten, dari rapat pertama kali sebelum RDP saya mendorong, mendorong ini loh Pak, saya harap dipertimbangkan. Tolong pikirkan situasi ini dengan mata hati loh Pak. Bahwa apabila hal ini berdampak dengan keluarga kita seperti apa, kan begitu. Itu yang penting. Kenapa saya sampaikan. Dari awal saya sampaikan untuk keikhlasannya kepada Dirjen dan Badan yang non teknis untuk mengikhlaskan kepada dirjen, dirjen teknis ini supaya bisa kerja. Saya dari awal menyatakan hal seperti itu. Kenapa? Karena kami ini duduk di DPR ini Pak ini dipilih oleh rakyat, dipilih oleh konstituen apalagi tadi ya kan, mungkin Bapak, Bapak tahu cerita saya berdarah-darah Pak, terus tiba-tiba Bapak main potong-potong saja itu semua bantuan yang aspirasi yang harusnya dijalankan. Sudah CPCL, teman-teman disini semua. Saya belum sanggup untuk dibilang pembohong Pak. Saya belum sanggup untuk itu. Dan tolong kalau bohong, bohong sendiri. Jangan ajak-ajak Pak. Itu yang pasti.

Dan yang kedua saya mau nanya, tolong langsung dijawab Pak. Apakah Bapak pikir kami ini DPR ini tidak membaca secara detail bahan-bahan yang Bapak beri. Bisa jawab tidak Pak?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Ya pasti dibaca.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Nah oke. Kalau memang Bapak menyakini dibaca sebenarnya dari kemarin saya menemukan banyak angka janggal. Contoh saja hari ini PKH itu coba diperhatikan baik-baik. Ayam itu semulanya 46.000 ditulisnya semula, menjadi jadi 770.000. Coba dihitungnya benar-benar Pak pakai kalkulator. Saya tadi sambil hitung berkali-kali apakah (suara tidak jelas) tapi 3 kalkulator yang berbeda harganya sama dari 46.000 jadi 700.000. Buset, ayam apaan Pak. Kan begitu.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ayam kampus kali.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Nah begitu, saya tidak tahu. Nah kemudian Bapak Prihasto, Bapak Dirjen Horti. Coba Bapak telusuri lagilah. Saya sudah menemukan di halaman yang seharusnya Bapak bisa pangkas. Kalau Bapak bingung yang mana, Bapak telepon saya, saya kasih tahu yang mana, ya kan, gitu loh. Karena begini, saya sudah sampaikan ke Pimpinan dan teman-teman yang lain. Kalau sampai begini terus caranya Kementan, kita angkat tangan. Apa terjadi pemeriksaan atau apa silakan sendiri. Karena banyak sekali program-program yang Bapak lakukan tanpa persetujuan DPR hari ini. Sudah lari duluan. Jadi tolong Pak kita saling jaga, Bapak jaga kita, kita jaga Bapak. Kan begitu. Enak nih kerjanya, Kan begitu.

Nah jadi saya mohon Bapak-Bapak tolonglah Bapak-Bapak juga introspeksi diri, itu kenapa kewenangan Bapak banyak dilimpahin juga ke Kementerian lain, ada apa? Saya ini selalu sidak Pak. Bilangnya surplus, surplus itu gudang masih banyak yang kosong, isinya kok begitu. Gitu loh. Saya mohon maaf Pak saya lagi puasa. Ini ngomongnya halus Pak, saya orang Sumatera. Jadi ngomong halus juga begini Pak. Jadi saya minta tolong, tolonglah diperbaiki. Dan saya sarankan tidak ada kita menyetujui Pimpinan, bahaya nih disetujui. Orang belum disetujui dia sudah jalan sendiri, jadi tidak perlu persetujuan kita juga kok, Kan begitu. Kalau bisa dia ke Kuningan sendiri, tidak usah ajak-ajak.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Kiki.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV. Selanjutnya persilakan kepada Eselon I Kementan untuk menyampaikan jawabannya.

Sebelum itu Pak Andi Akmal mau ngomong?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ya Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan. Setelah Pak Andi Akmal tolong dijawab pertanyaan dan tanggapan Anggota.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Pak Sekjen dengan Dirjen yang saya hormati,

Saya kira rapat kita 2 hari ini sudah kita dengarkan kesimpulan, pendapat, aspirasi dan harapan dari Anggota Komisi IV. Kita berharap bahwa Kementan betul-betul bisa melaksanakannya. Kita melihat bahwa relokasi dan refocusing yang ada itu menurut kami itu tidak fokus karena dengan berbagai macam pertimbangan.

Pak Sekjen,

Sebetulnya kita berharap bahwa apa yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan kita kemarin di awal masa periode itu tentang masalah Bansos, Alsintan, kemudian juga ternak. Sebenarnya harusnya kita menjadi strata sub fokus daripada Kementan karena itu juga bagian daripada penguatan pangan, dan juga penguatan daripada *social safety net*. Tapi yang miris di kita. Kita melihat bahwa ternyata pengurangannya sangat banyak.

Oleh karena itu saya secara pribadi Pak Ketua menyetujui bahwa realokasi yang kita lakukan 2 hari ini yang kita tidak setuju anggarannya yang tidak penting, kita fokuskan kepada program-program yang sudah menjadi kesepakatan kita. Kalau pun ada pengurangan pengurangannya sedikit. Seperti kemarin yang Pak Ketua sampaikan kalau ada pengurangan ya itu pengurangannya sedikit gitu, jangan seperti sekarang pengurangannya sangat banyak. Begitu pun dengan Alsintan yang kita lihat. Saya kira pembicaraan dengan teman-teman 2 hari ini sebenarnya menuju kesana, saya kira Pemerintah juga paham ya. Kenapa tidak ada perubahan-perubahan.

Jadi kesimpulannya Pak Sekjen, kita harapkan adalah kita ingin mengembalikan apa yang menjadi kesepakatan itu dan anggaran itu diambil dari bidang-bidang atau pun dirjen, dirjen yang menurut pandangan kami 2 hari ini itu tidak fokus. Ya kita kembalikan kesana. Kalau ini dikembalikan ini

bisa kita terima, tapi kalau tidak tentu ini menjadi sesuatu yang panjang. Itu yang pertama Pak Ketua sebagai kesimpulan dari saya menyampaikan hal itu supaya ini tidak berlarut-larut.

Yang kedua, sebenarnya Pak Sekjen kita berharap bahwa pada ketahanan pangan ini diperkuat. Malah kita lihat anggarannya juga dikurangi sangat besar. Siapa yang mau beli gabahnya petani selain Bulog tentunya karena memang Bulog dikasih tugas oleh Pemerintah. Kita berharap sebetulnya toko tani Indonesia. Nah kalau anggarannya ini dikurangi dan juga alokasinya dikurangi ya bagaimana harapan kita, siapa yang akan beli gabah petani pada saat mereka panen.

Saya kira ini menurut saya tidak sederhana masalahnya kalau memang Pak Sekjen dan semua Dirjen memahami bahwa sekarang ini kita kondisi darurat dan kita ingin semuanya segera berjalan, ya saya kira bisa kita selesaikan itu. Tapi kalau tidak, ya tentu menjadi catatan yang sangat berat karena ini sudah menjadi pembicaraan, harapan dan pandangan daripada Anggota Komisi IV. Saya kira demikian saja pandangan dari saya pribadi.

Terima kasih Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Silakan.

Siapa yang mau jawab duluan, Eselon I atau Sekjen. Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Baik Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Terima kasih masukannya. *Insha Allah* kami akan sesuai masukan-masukan, mudah-mudahan bisa menyisir lagi dan memprioritaskan tadi terkait dengan untuk menambah terkait dengan komitmennya yang telah teman-teman sampaikan. Terutama Dirjen PSP, PP dan juga kesejahteraan ini, peternakan dan *Insha Allah* Pak Ketua.

Yang kedua, tadi anggaran yang di Sekjen Rp1,3T itu bukan gaji, tetapi tunjangan kinerja seluruh pegawai Kementerian Pertanian maksudnya. Kalau gaji di masing-masing satker. Barang kali demikian selanjutnya Dipersilakan kepada Dirjen BUN.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Baik.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, para Wakil Ketua, Bapak dan Ibu para Anggota Komisi IV DPR yang kami muliakan.

Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas arahan, atas masukan yang luar biasa. Utamanya yang paling banyak adalah berkaitan dengan basis data. Kami mohon maaf sekali, ini kekeliruan kami dalam menentukan nomenklatur. Kami akan sebutkan beberapa rinciannya Bapak/Ibu sekalian, mohon maaf sekali. Karena didalam konteks ini ada anggaran Pak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian mengenai honor-honor tenaga pendamping kita dilapangan, yang itu berkaitan dengan akuisisi data dan olah data termasuk disitu ada mantri tani.

Nah untuk yang sifatnya sistem Pak Ketua kami laporkan Bapak/Ibu sekalian, itu besarnya setelah kami telisik Rp5,6 M. Ini yang mungkin kami serahkan ke Komisi IV DPR RI didalam konteks nanti pengalihannya kemana.

Nah yang kedua adalah yang berkait dengan program Covid, Kami merancang di lingkungan pertanian, diseluruh ke dirjenan dan Badan itu 3 strategi, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah berkait dengan jangka pendek antara dirjen juga bervariasi. Berkaitan dengan Dirjen Perkebunan, tadi banyak sekali komentar kok untuk Covid sedikit sekali. Saya salut dengan masukan Pak Ansy Lema tadi, betul sekali. Dan itu kami catat untuk perbaikan program-program kami termasuk juga program yang terakhir disampaikan oleh Bu Kiki.

Nah terkait dengan padat karya perkebunan kami juga sampaikan bahwa itu khususnya juga menyangkut bagaimana petani kita saat ini jangka pendek itu memperoleh pendapatan tunai. Karena disitu ada tunai yang kita berikan kepada petani kita. Benar atau tidak, kalau di perkebunan ini Bapak/Ibu sekalian kami sampaikan, yang pertama untuk program dan kegiatan perbenihan.

Nah memang disitu kita akan konsentrasi saat ini setelah refocusing yang kedua ini maka yang untuk perbenihan yang paling banyak berkait dengan pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih. Disitu perlu tenaga harian lepas, dan disitulah kami menghayal bahwa daripada petani-petani kita itu, buruh tani, petani miskin, petani penggarap dan itu yang akan kita berikan tunai untuk itu.

Yang kedua, mengait masih pada konteks padat karya. Itu kita berikan. Untuk yang misalnya pulang daripada, bukan pulang. Artinya petani-petani yang tidak lagi memiliki daripada sarana produksi, disitu kita sediakan juga

termasuk benih, kemudian pupuk dan juga obat-obatan. Itu yang menjadi komponen daripada ini.

Kemudian kelapa genjah, tadi juga ditanyakan. Terima kasih sekali masukannya. Sekali lagi bahwa ada program jangka menengah dan jangka panjang. Nah dan itupun kita pilihkan untuk yang kelapa yang jenisnya berpostur pendek tapi buahnya lebat, dan itu menurut pendapat kami sangat cocok untuk di pekarangan, dan ini akan tentu tidak bisa diambil pada saat ini, tetapi jangka menengah dan jangka panjang mungkin juga bisa pada saat konteks kita *me-recovery* daripada itu perekonomian itu rakyat kita dipedesaan seperti sekarang.

Kemudian fasilitasi operasionalisasi pasar. Kami Pak Ketua melaporkan, yang paling kami perhatikan terakhir karena kegalauan daripada masyarakat terkait dengan gula Pak, Ketua dan Bapak/Ibu sekalian, karena ketersediaannya langka dan itu tidak bisa dipikul sendiri oleh Badan Ketahanan Pangan. Kami berkontribusi didalam konteks hanya menyediakan anggaran transportasi Bapak/Ibu sekalian. Tetapi kami belum bisa bermitra, Bermitra dengan misalnya *food station*. Barangnya punya *food station*, tapi kita memberikan bantuan untuk bisa diikuti ditransportasi pada saat kita operasi pasar. Itu saja yang bisa kita alokasikan.

Kemudian yang terkait juga tadi ada pertanyaan untuk sertifikasi Ibu Nur. Bu Nur, semula kami merancang *nursery modern*. Tapi pada saat ini belum bisa dilakukan karena memang anggarannya dipotong dan itu akan kita alokasikan nanti untuk kebun benih, kebun sumber benih. Dan disitu akan kita rancang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mensertifikasi, sebenarnya itu. Tapi pertanyaan Bu Nur tadi mengarah kemana yang modern ini Pak Dirjen. Itu sebenarnya adalah rancangan daripada *nursery modern* yang harus kita bangun. Tetapi ini hanya tinggal tiga. tiga ini sesungguhnya adalah berhenti untuk pembiayaan perencanaannya. Sehingga kita akan mengalihkan untuk tahun depan, untuk tahun ini. Tetapi lantas kami berfokus kepada penyediaan benihnya, produksi maupun pengadaannya.

Tadi Pak Ansy Lema juga menyampaikan bahwa tidak sekedar hanya pengadaan tetapi itu kita kaitkan dengan program kawasannya sehingga itu dalam konteks *replanting*, yang sudah lama itu kita perbaiki dengan memproduksi benih, benih unggul. Tadi juga Bapak menyampaikan beberapa komoditas yang perlu ditunjang untuk itu.

Nah maka kami perkuat dengan membangun logistic benih itu. Jadi antara logistic benih dengan kawasan itu mengait karena dikawasan itu hanya menyediakan anggaran untuk pupuk dan obat-obatan tapi tidak sertamerta dengan distribusinya mengenai pengolahan dan pengolahan hasil, lantas benihnya diambil dari kebiasaan logistik kita padukan. Itu yang secara umum tadi disampaikan.

Terima kasih, kami akan mengkoreksi nomenklatur yang tidak tepat mengenai basis data tetapi sesungguhnya disitu berkaitan dengan akuisisi data

yang melibatkan pendamping dan tenaga-tenaga kita dilapangan yang sifatnya adalah honor, Bapak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian.

Kemudian pertanyaan lain yang sifatnya umum dari Pak berkait dengan PMK tadi. Nanti kami akan komunikasikan dan koordinasikan dengan Kementerian Keuangan menyangkut masalah PMK tersebut.

Saya kira ini yang paling urgent yang tadi banyak disampaikan. Sekali lagi mohon maaf Pak Ketua. Kami tidak tepat menaruh nomenklatur tapi disitu ada anggaran yang barangkali tidak bisa dipotong lagi karena memang anggaran yang sifatnya honor petugas-petugas pendamping kita dilapangan.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen Perkebunan,

Kalau kita lihat disini pengembangan basis data. Tadi anda katakan ini termasuk honor. Ada Rp5,6 Miliar. Sekarang yang saya pertanyakan, berapa banyak bantuan untuk Anggota Komisi IV Bansos perihal mesin penggilingan kopi dan roasting. Ini kan saya dengar dipotong cukup banyak.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Baik Pak. Kami sesuaikan Pak.

KETUA RAPAT:

Kemudian Nomor 11 pengembangan sertifikasi dan pengawasan perbenihan serta produksi tanaman perkebunan modern. Ini gila sekali angkanya Rp108 Miliar. Apa ini yang dikerjakan, saya mau tahu.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Baik Pak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian.

Jadi sebenarnya ini adalah pelayanan yang sifatnya rutin di badan besr kami Pak. Jadi setiap saat kita menyediakan, besarnya tidak jauh berbeda sekitar 120 – 100 Miliar. Dan itu sudah rutin kita laksanakan sebagai layanan sebagian besar Pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang sampai Rp108 Miliar. Ini waktunya tinggal 8 bulan loh. Saya minta ini dipotong juga nanti. Coba nanti dituliskan.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Silakan Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Satu lagi, belanja operasional rutin. Rp22 Miliar sekian, ini apa yang belanja rutin ini.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Baik.

Disitu sebenarnya yang rutinnya adalah operasional saya dan jasa adalah , dan setiap tahun diseluruh UPT sertifikat kita yang di Pusat. Itu yang beberapa yang masuk di dalam belanja operasional rutin kita.

KETUA RAPAT:

Ini satu layanan loh Rp22 Miliar. Asal anda tahu Komisi IV saja 1 tahun anggarannya Rp23 Miliar. 1 tahun untuk seluruhnya, kemudian kami pun dipotong, Dipotongnya tidak tanggung, tanggung Dari Rp23 dipotongnya Rp15 Miliar, masa ini hanya pelayanan begini sampai Rp22 Miliar. Saya minta dievaluasi lagi.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN:

Baik Pak.

Itu ada 4 UPT Pak yang kami sampaikan, di Pusat, kemudian 3 Balai Besar dan 1 Balai di Pontianak. Itu untuk biaya-biaya yang untuku operasional rutin Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nanti dipotong saja itu.

Ya selanjutnya.

SEKJEN KEMENTAN:

Saya minta selanjutnya Dirjen Hortikultura.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA:

Baik.

Terima kasih.

Mohon ijin Pak Ketua.

Pak Sekjen, Bapak/Ibu yang saya hormati.

Jadi terkait dengan hortikultura memang pemotongannya cukup besar dari 50%. Jadi dalam hal yang mana kami kurang-kurangi dalam anggaran tersebut. Kami melihat ada *outstanding* kontrak yang sudah ada. Nah salah satu dan kami sudah ingatkan berkali-kali kepada daerah khususnya terkait dengan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura karena itu berupa pasca panen yang sebetulnya sudah namun ternyata begitu sejak awal tahun anggaran kami sudah sampaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten agar segera melakukan lelang dan ini sudah ada didalam katalog, dan mereka ternyata sangat lambat sekali untuk pelaksanaan itu sehingga begitu ada refocusing dan ternyata karena refocusing cukup besar, ini khusus untuk mengolah pasca panen yang tadinya dialokasikan Rp86 Miliar, ini terpotong dan hingga tersisa Rp7 Miliar. Ini karena memang *outstanding* kontrak yang akan diskip disitiu dan saya juga selalu mendorong meminta kepada daerah untuk segera melaksanakan. Karena apa? Karena kontrak untuk pengadaan alat ini sebetulnya tidak tergantung oleh musim, tidak tergantung oleh cuaca, segera bisa dilaksanakan. Dan ini tidak dilaksanakan oleh daerah. Sehingga ini dari Rp86 Miliar kita potong ada refocusing tinggal Rp7 Miliar ini dari Pak Darori kami ingin memberikan penjelasan.

Terus yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bantuan untuk penanggulangan covid. Disini perlu kami sampaikan Pak Ketua, memang kami punya pertama yang besar adalah di perbenihan, Kami melihat kenapa kami alokasikan banyak karena banyak warga, masyarakat yang kena PHK pulang kampung, mereka tidak punya pekerjaan. Dan kami berinisiatif memberikan bantuan benih sayuran, berinisiatif memberikan benih buah-buahan semusim supaya masyarakat yang pulang kampung bisa bekerja, bisa menanam dan bisa memiliki penghasilan dari kegiatan penanaman tersebut. Kami alokasikan dan ini tidak kami potong, malah kami tambahkan anggaran sebelumnya teralokasi Rp34 miliar ini kita tambahkan kami tambahkan Rp2 miliar menjadi Rp36 miliar begitu Pak Ketua.

Nah sementara untuk kegiatan yang bantuan untuk distribusi pangan ini memang kita harus segera punya peta Bapak Ketua dan Bapak/Ibu semua. Dimana daerah yang surplus, dan dimana daerah yang minus untuk prioritas itu Pak Ketua. Nah kami mengalokasikan anggaran itu membantu petani dalam hal transportasi dari daerah surplus ke daerah minus. Supaya petani tidak dibebani biaya lagi transportasi dalam hal ini. Dan kami mengalokasikan juga dalam hal ini kegiatan sebanyak Rp5 miliar untuk membeli langsung, langsung dari petani untuk kami distribusikan untuk buah-buahan dan sayuran. Sementara dari Hortikultura yang bisa kami sampaikan.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi saya ingatkan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Hermanto. Mau apa Pak Hermanto?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya saya mau nanya ke Dirjen Hortikultura nih Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Itu terkait dengan program covid kan ada 5 jenis program covid. Tapi tidak jelas volumenya. Dan ini pendampingannya Anggota seperti apa. Itu yang ingin saya dapat ketegasan dari Pak Dirjen.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Suhardi Duka. Sekalian nanti dijawab.

Silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya mau tanya kepada Dirjen, yang mengurangi anggarannya sampai dengan 50% itu siapa? Apakah Menteri langsung, ataukah Sekjen atau siapa? Sehingga tidak adil pembagian pengurangannya di antar Dirjen yang ada di Kementerian Pertanian, ada yang hanya 6%, ada yang 20%. Siapa yang mengurangi sesungguhnya?

Silakan Pak Dirjen atau Sekjen.

KETUA RAPAT:

Ya dijawab silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Jadi begini, mekanisme kami dapat data masing-masing belanja mengikat data realisasi dan data *outstanding* kontrak dari masing-masing Eselon I melalui Ses-nya, Kemudian dari situ di proporsional. Nah ini memang kami mau cek lagi. Jadi setiap kali menentukan kami semua bersama Bapak/Ibu Ketua. Tidak ada intervensi sama sekali. Tapi kalau tadi ada kekeliruan, kekeliruan akan kami sisir kembali karena saya juga melihat setelah kemarin arahan Pak Ketua, memang yang belanja mengikat dengan realisasi ini saya bedah lagi ada yang redunden 2 kali hitung.

Nah disitu mungkin mudah-mudahan yang diperoleh lebih baik. Jadi ini semuanya didiskusikan Kepala Biro Perencanaan dengan Sesbid, Ses Mid, Ses Badan tetapi semuanya dikomunikasikan ke Eselon I-nya masing-masing. Barangkali demikian prosedurnya Pak Ketua proses dalam pemotongan dan penyusunan anggaran.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada yang mau dijelaskan?

Silakan Mbak Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tadi yang disampaikan Pak Dirjen Hortikultura ini belum tepat sasaran dan saya belum pahami kegiatan-kegiatan apa lagi yang tadi saya sudah tanyakan belum dijawab. Itu kan dari penanganan dampak perubahan iklim itu per hektar, per satuan, per pemotongannya sehingga dapat Rp15 M ini apa kegiatan yang dilakukan, bentuknya seperti apa biar kita juga bisa tahu.

Terus ada juga di kawasan di buah lainnya. Disitu kan dari Rp20 M sampai Rp7 miliar lebih. Apa kalau mau ditanya, apa standarisasinya seperti apa, belum dijawab sama Dirjen Hortikultura. Banyak kegiatan-kegiatan lain juga seperti di kawasan bawang putih, Ini juga belum dijelaskan. Pak Dirjen, tolonglah jelaskan dulu kegiatan-kegiatan itu biar kita paham. Kalau memang harus ada pemotongan-pemotongan ini ya tadi yang disampaikan Pak Sekjen harus ada transparansi dari semua Dirjen atau Eselon I biar kita tahu pemotongan berapa-berapa persen dan ada beberapa Dirjen yang mungkin jangan dipotong sama sekali karena ini sangat bersentuhan langsung dengan para petani, peternak dan lain sebagainya. Seperti itu, Tolong dijelaskan dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Alien.

Silakan dijelaskan Pak Dirjen.

Ya Mbak Kiki sekalian pertanyaannya, nanti langsung dijawab sama Dirjen.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Coba Pak Dirjen Horti, saya minta penjelasan point 12 tentang pengawalan pelaksanaan program kegiatan pedoman. Itu apa 45. Terus yang point 15-nya itu. Point 12, point 15. Coba dicek biar sekalian dijawab itu.

KETUA RAPAT:

Ya silakan jawab.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA:

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Hermanto nanti kami jelaskan Pak. Nanti kami berikan rinciannya Pak, itu akan digunakan untuk apa saja. Jadi *breakdown* Pak.

Yang kedua, dari Ibu Alien Mus ini terkait dengan dampak perubahan iklim. Ini kegiatannya, jadi seperti kita pahami bersama bahwa kedepan ini akan ada musim kering yang cukup panjang. Informasinya demikian. Jadi kami mengalokasikan untuk itu untuk bantuan opra irigasi mikro untuk hortikultura, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan dampak perubahan iklim. Jadi itu bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Terus yang kedua, untuk kawasan buah lainnya. Memang disini ada kawasan buah yang menjadi prioritas nasional yaitu kawasan untuk jeruk, mangga, manggis, pisang, durian. Ini adalah buah-buahan yang menjadi prioritas nasional. Nah untuk buah lainnya disini yang tidak masuk didalam buah-buahan yang menjadi prioritas nasional. Ini bisa digunakan untuk kelengkeng, buah naga, alpukat dan buah-buahan lainnya. Memang alokasinya turun dari 1451 hektar menjadi 400 hektar.

Nah terus dari Ibu Kiki, kami sampaikan terkait dengan pengawal pelaksanaan program kegiatan pedoman ini tentunya memang terkait dengan, kami harus melaksanakan monitoring keseluruhan Provinsi yang ada alokasi dari kegiatan hortikultura seluruh Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan pengawalan, sekaligus juga penyusunan pedoman, sosialisasi, penyampaian MSDK-nya untuk kegiatan-kegiatan hortikultura.

Terus untuk kegiatan yang Nomor 15, hubungan punishment. Disini ada layanan keSatkeran ada, ya banyak banyak kegiataannya ada kegiatan di kami 7287 orang untuk operasional Satker seluruh Indonesia dan 101

Satker dan lain sebagainya. Jadi data-datanya jelas disampaikan didalam usulan penganggaran yang kami serahkan ke Komisi IV DPR RI.

Saya kira sementara itu penjelasan dari kami Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini ada yang saya pertanyakan masalah kawasan bawang putih. Ini mencapai Rp72 Miliar. Saya minta dipotong. Karena saat ini bawang putih yang panen pun belum diserap. Kemudian ada lagi, yang pengawalan program kegiatan pedoman, itu tolong dialihkan saja. Diperbanyak bantuan bibit benih sayur, obat untuk masyarakat. Jadi ini dipotong Tolong direalokasikan langsung ke anggaran yang saya minta tadi terutama benih, sayur, jagung, jagung yang kecil, kemudian tanaman obat, toga dan lain-lain.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA:

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Termasuk juga kalau dulu kalau tidak salah di Kementerian Pertanian ada P2HP yang memberikan bantuan alat packaging dan lain-lain. Dialihkan saja ini kesana. Kalau memang tadi anggarannya tidak cukup nanti kita realokasikan dari anggaran kemarin yang kita potong. Kita kembalikan lagi ke hortikultura. Yang penting perbanyak kegiatan untuk masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA:

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Itu saja.

Silakan selanjutnya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Siap Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

Silakan Badan Ketahanan Pangan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Yang pertama tadi terkait dengan lembaga distribusi pangan. Lembaga distribusi pangan tadi ada yang menanyakan termasuk dari Bu Maria dan Lembaga distribusi pangan ini intinya ada beberapa kegiatan Pak. Yang pertama adalah kita itu membina sekitar 903 sekarang totalnya Yang itu dia menjadi pensuply bahan pangan yang dijual di PPI. Jadi kita bina mereka, kita fasilitas mereka. Kemudian kita juga mempunyai PPI totalnya ada, kemudian kita juga mengembangkan lumbung pangan masyarakat. Jadi lumbung pangan yang dibikin masyarakat. Nah ini 3 misi lah yang menjadi 3 kegiatan didalam lembaga distribusi pangan.

Kemudian yang kedua, kami dari Ibu Luluk terkait dengan pelayanan Bu, Ini untuk intinya yang ditetapkan untuk bahwa kita termasuk itu halusinasi kemudian disepakati juga sudah berkurang. Jadi kemungkinan kita bisa mempertahankan itu.

Kemudian Pak Made Urip terkait diserfikasi pangan. Terima kasih Pak Made Urip. Kami juga punya kegiatan serupa yang katanya pengembangan industri pangan lestari Pak. Pengembangan industri pangan lestasi ini kita juga harapkan di beberapa Provinsi semula direncanakan disetiap Provinsi, tapi karena ada pemotongan ini jadi.

Kemudian yang lain-lainnya terkait dengan kegiatan kajian yaitu kegiatan kebijakan ketahanan pangan yang cukup banyak. Yang pertama, kita selalu monitor stok Pak Ketua. Yang namanya kita harapkan Pak ketua yang namanya surplus ketersediaan dan ... produksi. Jadi produksi (suara tidak jelas) yaitu dengan kegiatan importasi. Nah ini kita lakukan setiap bulannya kita lakukan untuk monitoring yang dilakukan oleh Lembaga lain yang bekerjasama dengan kita untuk sama-sama kita mendapatkan angka yang benar. Kita evaluasi per bulan dan kita lakukan untuk tiga bulan ke depan. Tinggal ini sekarang ini bulan April kita ini meneruskan dan ini bulan April, Mei, Juni, dan (suara tidak jelas). Jadi kemungkinan angka yang sekarang itu dengan angka ditunjukkan malah itu ada perubahan karena ada perubahan realisasi.

Saya rasa itu Pak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian. Selebihnya saya terima kasih atas saran-sarannya. Mudah-mudahan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara Kepala Badan,

Saya ini bingung juga. Anda tiba-tiba ada membuat ATM beras. ATM beras ini berlaku hanya sementara covid atau sampai kapan? Itu yang pertama.

Yang kedua, masalah Toko Tani. Toko Tani itu bukanya cuma berapa jam. Barangnya pun tidak ada. Operasionalnya bagaimana? Tolong, sekali lagi Kepala Badan saya minta tolong, jangan membuat pencitraan dan kebohongan data. Periode lalu pun anda sebagai Kepala Badan datanya selalu tidak benar. Tolong, Pertama kali Rapat Kerja dengan Mentan yang baru saya katakan, stop kebohongan yang sudah lama. Kita bangun kebersamaan, kita bangun data yang benar yang valid. Kalau datanya saja tidak valid bagaimana kita mau menyelesaikan masalah. Ibarat kita ke dokter, dokternya tidak tahu apa yang kita derita, apa yang badannya tidak enak. Tolong sekali lagi saya ingatkan, Semua data kebohongan ada sama saya. Stop sudah Bicaralah yang jujur. ATM beras ini kan menghabiskan cukup besar. Nanti wilayah lain juga ingin minta. Seberapa pentingnya, Saya ingatkan sekali lagi.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Baik Pak Ketua.

Terima kasih.

Yang pertama mohon maaf, ATM adalah kegiatan oleh Badan Litbang pertanian Pak.

Jadi yang kedua, Kebetulan di Indonesia memang tidak bisa tapi kita membantu akses pangan masyarakat Pak. Kita menjual harga yang murah. Tadi saya ceritakan pemotongan per pasok karena kita memperoleh beras yang masuk itu yang kami lakukan. Memang tidak bisa seluruhnya tapi kita membantu khususnya sekarang ini kami fokuskan adalah untuk masyarakat-masyarakat kelas menengah kebawah. Itu yang kami lakukan.

Yang terakhir Pak Ketua, terima kasih sarannya Pak. Kami benar sekarang melakukan pertemuan dengan institusi yang terkait untuk menyepakati angka-angka. Kami tidak mau angka itu keluar dari kami saja termasuk kami sepakati lagi dengan BPS dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kita, Itu yang kami lakukan supaya angka-angka kami tidak terlalu berlebihan. Itu yang kami lakukan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya selanjutnya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Selanjutnya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Baik terima kasih.

Bapak Ketua yang terhormat,
Bapak Anggota DPR RI Komisi IV.

Sekarang kami akan menjelaskan terkait dengan panduan penyerapan unggas oleh. Sebenarnya ini adalah langkah SOS saja. Itu satu. Sambil menunggu penugasan dari BUMN terhadap BUMN kami, terhadap BUMN, BUMN (suara tidak jelas). Karena ini mereka ini masih dalam taraf rapat, kami harus mengambil langkah cepat.

Yang kedua, sebenarnya tidak ada reka-reka itu, anggaran APBN yang diambil dari itu. Karena itu terkait dengan pengurangan CSR mereka masing-masing. Nah terkait dengan angka-angka ini yang tertera ini mungkin kiranya bisa dicek kepada orang-orang yang ini, Karena kami tidak mungkin berani menyatukan angka sembarang.

Kemudian (Suara tidak jelas), bahwa ini adalah angka sesuka kami yang kami isi. Rekaman video callnya ada. Arahan dari Pak Menteri ada, bagaimana kita harus menjadi pahlawan dalam situasi begini. Kami mendorong para integrator yang dalam hal ini tanda petik mempunyai CSR itu, itu untuk memanfaatkan untuk menyerap peternak *life bird* ternak mandiri.

Terkait harga waktu itu kami sebenarnya mendorong kepada harga agar minimal HPS Tetapi kami mendapatkan informasi dan saat *Vidcon* itu bahwa mereka yang menggunakan (suara tidak jelas) itu tidak setuju dengan harga yang itu dalam situasi covid seperti ini. Maka kami diskusikanlah dengan jalan tengah. Jalan tengah kami tanya kepada peternak ini, berapa sebenarnya harga yang paling wajar menurut Bapak-Bapak ternak mandiri karena ini terus terang pasti para peternak mandiri menonton ini semua karena kami yakin kami selalu chatting-chattingan. Yang paling wajar mereka Rp15 ribu, Kami baru bisa bernafas. Nah integrator semua didalam keadaan situasi perekonomian yang jatuh. Makanya integrator juga memikirkan barangkali dengan perusahaan mereka dan karyawan-karyawan yang mereka terancam dirumahkan. Ini sebenarnya jalan kenapa harga itu... Kemudian mengikutilah mereka berapa bandingin. Mereka tulis sendiri berapa, karena itu mengikuti sepakat. Jadi ini adalah empati saja sambil menunggu action daripada penyerahan oleh BUMN.

Yang kedua, terkait dengan data. Kami yakin kalau data kami ini dapat dipercaya karena kami kordinasi dengan BPS secara rutin. Yang kedua, kami terkait data humas, kami diback-up oleh Komisi Ahli yang ahli menghitung didalam hal itu. Jadi kami tidak menghitung sendirian.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen,

Saya tanya, berapa banyak kelebihan DOC-nya dalam keadaan normal yang harus di cutting. Karena beberapa pengusaha sudah melaporkan ke Komisi IV waktu itu melalui Asosiasi minta di cutting, tetapi inilah yang menjadi harganya anjlok. Jadi jangan bisa bilang Komisi Ahli, Komisi Ahli lah.

Anda sebagai Dirjen harusnya yang bertanggung jawab. Jangan melepaskan tanggungjawab ke Komisi Ahli, tidak bisa. Yang lain saja, Dirjen lain tidak ada Komisi Ahli itu cuma anda saja. Jadi seolah-olah kalau terjadi masalah itu bukan Dirjen yang salah tetapi Komisi Ahli. Cobalah. Disini kita lihat. Harga 1 ekor ayam Rp770.000 pengadaannya. Ayam apa coba, saya minta dijawab dulu. Harga seekor babi Rp9 Juta. Saya minta dijawab dulu ini. Bapak jelaskan dulu yang lain.

Silakan jawab.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Mohon ijin Pak Ketua.

Terima kasih.

Terkait dengan Komisi Ahli karena kami mengeluarkan rekomendasi, bukan kami mengeluarkan ijin. Ijin itu ada di perdagangan. Untuk rekomendasi, kami perlu dinilai oleh orang yang kami anggap netral.

KETUA RAPAT:

Seberapa netralnya yang Komisi Ahli tadi saya mau tahu.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Kami tidak bisa mengukur seberapa netral tetapi.

KETUA RAPAT:

Tadi anda mengatakan ada ukurannya. Sekarang saya tanya, seberapa ahlinya, seberapa netralnya, seberapa jujur sebagai tanggungjawab pejabat negara. Coba saya minta penjelasan dulu harga ayam Rp770.000, yang awalnya Cuma 46.154 ayam lokal. Kemudian harga babi Rp9 juta. Saya minta tolong dijelaskan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Terkait Pak ketua, dengan hal itu. Kami akan jawab itu terkait dengan paket. Jadi ada ayam 47.000 paket, ada kandang, ada pakan Jadi bukan ayam saja.

KETUA RAPAT:

47.000?

Kemudian ini tiba-tiba berubah jadi 770.000. Saya sudah katakan pada waktu itu dalam Rapat Kerja awal. Yang namanya ayam bekerja itu semua bermasalah. Kenapa masih diulangi lagi. Anda juga tahu kok sekian truk dari Jawa Timur mau dibawa ke Sumatera Barat mati ayamnya semua. Kok ini

masih mau diulangi lagi. Dari awal saya sudah bilang. Hilangkan yang begini-begini yang tidak benar ini. Ini loh. Saya bingung 1 ekor ayam 770.000. Coba anda lihat, anda hitung lagi.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Baik Pak Ketua, kami akan cek lagi terkait harga itu.

KETUA RAPAT:

Anda pegang buku, anda data, anda hitung sekarang. Kok jadi Rp770.000, Silakan saja lihat. Disini ada staf ahli saya 4-5 orang menghitung, bahkan saya pun tidak percaya. Saya hitung ulang lagi.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Mohon ijin Pak Ketua boleh, nomor berapa itu?

KETUA RAPAT:

Halaman 4 Nomor 15. Ayam lokal yang volumenya semula 8 Juta lebih akhirnya terakhir setelah dipotong menjadi. Ayam lokal di a dan b, babi. Coba lihat.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Baik Pak Ketua, nanti kami cek ulang nanti supaya bisa dijelaskan. (suara tidak jelas). Kami nanti perbaiki Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya lanjutkan pertanyaan Anggota, nanti akan saya tanyakan kembali.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Nah terkait dengan pemotongan untuk insiminasi buatan. Kenapa kami tidak potong banyak, karena disana pada insiminasi buatan itu banyak sekali menyerap para insiminasi kita. Insiminasi itu tiap hari mereka bekerja dilapangan. Ketika ini kita kurangi, maka mereka otomatis hampir 5000 insiminasi itu dengan biaya suntik, nanti bisa kehilangan pekerjaan lagi. Itu yang membuat pertimbangan kami kenapa dalam ini kami tidak ragu meminta dukungan, dukungan lagi.

Selanjutnya terkait daging kerbau Pak Ketua mohon ijin. Sebenarnya kami terus terang sudah dijelaskan, pernah menjelaskan bahwa kami itu memberikan rekomendasi teknis terkait dengan syarat-syarat pemasukan bagi yang diatur oleh PP Nomor 7 dan Permentan Nomor 16, dalam hal-hal tertentu dan ... negara Sebenarnya secara ilmu pengetahuan dengan hal ini sepanjang dimasukkan dengan tanpa bantuan kemudian dilanjutkan pihak (suara tidak jelas). Ini secara ilmiah.

Nah selanjutnya terkait dengan nanti besarnya itu diputuskan oleh Rakortas, bukan kita yang memutuskan. Kami sebatas mengusulkan dalam rapat itu, dan yang memutuskan adalah hasil Rakortas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Rapat kebijakan impor, rapat kebijakan kerbau itu dan lain sebagainya, termasuk kalibrasi, dipicu semua, diputuskan didalam Rakortas. Nah mungkin rekaman-rekaman itu ada, dan bagaimana.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, tolong fokus yang ditanya Anggota dulu. Kalau masalah Rakortas itu masalah nanti.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Charles.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Pak Ketua, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Peternakan tadi harus benar-benar menjadi catatan yang sangat kebal itu Pak Ketua. Ini soal data yang sangat signifikan itu menurut saya harus ada catatan yang sangat kebal buat dia bersangkutan. Saya pikir ini di Dirjen Peternakan dan dalam hal ini Manager dalam hal ini Pak Sekjen dan Pak Menteri harus tahu ini data-data yang semacam ini kalau terus digunakan ini bisa menjerumuskan semua orang.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih masukannya Pak Charles.

Lanjutan Saudara Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Nah terkait dengan yang lain-lain kami akan koreksi sesuai dengan masukan dan saran dari Komisi IV.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi dijelaskan bahwa ada beberapa perusahaan besar yang akan membeli. Membeli ayam dari peternak. Betul begitu Saudara Dirjen?

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Betul Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masing-masing ada yang 1 Juta. Yang perusahaan besar seperti tadi the house atau universal, kemudian ada Charoen Pokhpand, ada Java. Tadi disampaikan bahwa contohnya the house tadi dikatakan sudah hampir 90.000, bukan begitu data tadi? 90.000 ekor, betul tidak? Tadi data yang disampaikan, ditayangkan di kami, betul tidak begitu?

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Ijin Pak Ketua, kami cek. Yang jelas, kalau yang jelas di kami sekarang ini baru sampai tujuh persen, tujuh koma sekian persen.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah ditampilkan datanya Saudara Sekjen bahwa PT The House atau Universal memotong, sudah serap hampir 90.000. Iya toh. Tadi kan anda yang menayangkan datanya.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Mohon ijin Pak Ketua, Nah diatas ini.

KETUA RAPAT:

Coba ditayangkan lagi yang tadi data serapan tadi. Darimana tadi data serapan. Silakan ditayangkan dulu data serapan yang tadi, serapan itu. Yang pengusaha membeli dari peternak kecil. Saya mau tanya, per hari ini berapa banyak yang sudah dibeli dari peternak kecil?

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Mohon ijin Pak Ketua.

Jumlah kesanggupan perusahaan realisasi membeli. Nah ini kesanggupan pembelian misalnya contoh Charoen Pokhpand, ya sanggupnya segitu. Memang realisasinya 66 ribu jumlah keseluruhan. Baru 6,7%, 6,66%. Tetapi ini *update* 26 April. Nah untuk the house misalnya dia janji 1 juta realiasinya.

KETUA RAPAT:

Bukan dia janji 1 juta tapi permintaan Saudara Dirjen. Mereka melapor ke saya, salah satu petinggi the housenya. Ini kami diwajibkan bla-bla-bla untuk dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Mohon ijin Pak Ketua.

Mungkin rekaman Vicallnya kami bisa share kepada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Dan kalau kita lihat disini per harinya cuma hanya, contohnya the house 1.635, dan untuk mencapai 1 juta saya rasa setahun ini. Peternak kecilnya keburu mati ini. The house itu kan tidak punya rumah potong hewan unggas, tidak punya *cold storage*. Tidak tahu kalau yang ngomong Charoen Pokhpand, atau Java, atau Super Unggas, saya tidak tahu. Termasuk didekat rumah saya ada namanya Sijes perusahaan Korea. Dia tidak punya rumah potong hewan unggas.

Jadi tolong sekali lagi, tolong bantu kami sajikan data yang benar. Tolong sekali, data yang benar. Supaya kita bisa mencari jalan keluar. Jangan sampai peternak kecil mati, peternak besar mati. Akibatnya apa? Indonesia kekurangan ayam akan datang. Sekali lagi saya selaku Ketua Komisi IV minta tolong, jangan akal-akalan data. Anda sebagai Dirjen bisa memberikan kami data tetapi waktu babi ini harga Rp9 Juta, ayam kampung Rp770.000 anda malah bertanya sama kami, halaman berapa. Jadi saya bingung Yang membuat ini siapa, kok bisa dikirimkan anda sendiri tidak tahu. Mohon maaf, hari ini puasa. Tetapi karena saya sangat jengkel sekali melihat data ini. Tolong, sekali lagi saya katakan tolong, Saya minta data yang valid. Itu saja.

Terima kasih.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, kasih masukan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya terkait dengan data kesanggupan perusahaan. Justru saya ingin memberikan masukan bagaimana kemudian memang Pemerintah ini tidak dikibulin. Jangan sampai misalnya kesanggupan CV 1 Juta, yang ingin saya sampaikan perusahaan CV sendiri itu punya ayam internal dia. Dia internal sendiri punya. Jangan sampai 1 Juta yang disanggupkan untuk menyerap petani rakyat itu sebenarnya ayam-ayam mereka sendiri. Demikian juga dengan PT-PT yang lain.

Nah kalau PT-PT yang saya sebut tadi, dia itu bukan *integrated* Pak Dirjen. Jadi sebagian itu saya tahu dia bukan *integrated* hanya peternakan biasa, tidak punya RTA, tidak punya seperti itu sehingga. Makanya saya tanya, datanya ini oke. Kalau memang mau disampaikan termasuk videonya maka dishare ke Komisi IV, akan saya lihat.

Jadi artinya jangan sampai juga Pemerintah dikibulin. Iya saya sanggup 700.000 misalnya Java. Itu ayamnya dia sendiri bukan ayam peternak. Hari ini yang kelimpungan yang memang sudah pada PHK, saya sendiri sudah PHK beberapa karyawan saya. Itu adalah punyanya mandiri nah itu. Jadi kesanggupan seperti 1 juta CV itu mungkin bisa jadi realisasinya tapi dia ayam sendiri Pak, bukan ayam peternak mandiri. Itu catatan saya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Slamet.

Silakan dilanjutkan. Kalau sudah cukup kita bikin kesimpulan. Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Ya sudah semua Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, setelah saya sisir seperti komitmen awal di setiap ini masih ada pupuk organik. Di Hortikultura ada, di perkebunan ada. Silakan di cek pelan-pelan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Coba Hortikultura pupuk organik dicek ya.

KETUA RAPAT:

Dari awal kita sudah sepakat tempatkan saja di PSP jadi satu. Nanti di cek dulu Pak. Kemudian kemarin Sekjen janji bahwa akan memberikan standing kontrak yang sudah dibuat. Tolong kalau bisa besok diberikan ke kami supaya kami jelas, mana yang sudah kontrak, mana yang belum. Yang sudah kontrak pun kalau anggarannya tidak cukup kan bisa diandendum. Kasihan Pak Menterinya, Jangan jadi beban Beliau semuanya. Karena kalau ada masalah, yang kena Menterinya bukan Dirjennya atau Sekjennya.

Ada lagi yang mau disampaikan Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Cukup Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita lagi ketik konsep kesimpulan rapat, sebentar (rekaman terputus).

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI sangat menyesalkan usulan pemotongan terhadap program pada Direktorat Jenderal teknis yang terlalu besar, seharusnya kegiatan bantuan pangan dan saprodi justru diperkuat dalam mengantisipasi dampak COVID-19.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, kegiatan

pembinaan tidak prioritas, kegiatan tidak mendesak serta kegiatan yang bersifat *ceremonial* diminta untuk direalokasi untuk kegiatan yang bermanfaat langsung kepada petani dan masyarakat.

Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTAN:

Iya setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar dilakukan realokasi pada kegiatan setiap Eselon I sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp812.670.698.000,00 (delapan ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada kegiatan Pengembangan Basis Data Spasial, Peningkatan Sistem Informasi Perkebunan Berbasis Web/Android/ios, dan Pemutakhiran Sistem Komunikasi dan Pengolahan Data; Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Perbenihan serta Proteksi Tanaman Perkebunan Modern; dan Belanja Operasional Rutin.
 - b. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp556.146.411.000,00 (lima ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) pada kegiatan Peningkatan Produksi terhadap Kawasan Bawang Putih; Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; Peningkatan Produksi terhadap Kawasan Buah Lainnya; Pengawasan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Pedoman; dan Layanan Dukungan Manajemen.
 - c. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp218.000.000.000,00 (dua ratus delapan belas miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp1.219.759.789.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada kegiatan Pakan Olahan dan Bahan Pakan; Optimalisasi Reproduksi; Bantuan Budi Daya Ayam Lokal Pedaging Antisipasi Dampak COVID-19; serta Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Direktorat Teknis.

- d. Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp87.000.000.000 (delapan puluh tujuh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp475.903.216.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) pada kegiatan Lembaga Distribusi Pangan, Kajian dan Kebijakan Ketahanan Pangan.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen? Apa mau di skors lagi?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Tidak Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan dilihat dulu. Saya kasih waktu.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Untuk ... setuju tapi disini barangkali nanti. Tadi dari diskusikan pemanfaatannya untuk hilirisasi ya Pak ya ?

KETUA RAPAT:

Ya betul.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Biar saya mengesahkan, Pak Dirjen tolong 66 Miliar hasil dari Refocusing ... untuk hilirisasi. Yang b untuk Dirjen Hortikultura, setuju.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen,

Nanti di Nomor 5, ada keterangannya. Untuk apa, untuk apa, untuk apa, ada. Jelas kan?

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Oke setuju.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen setuju? Pak Sekjen setuju?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Setuju Pak. Nanti kita lihat keterangan yang nomor 5.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian dan untuk memulihkan, menambah kegiatan prioritas berupa bantuan kepada petani di masing-masing Eselon I yang mengalami pemotongan secara signifikan yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Perkebunan pada kegiatan pasca panen dan pengolahan hilirisasi serta pemasaran hasil perkebunan antara lain alat pengolahan panen dan bantuan benih.
 - b. Direktorat Jenderal Hortikultura pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura antara lain alat pengolahan pasca panen serta bantuan benih (antara lain: tanaman obat dan sayuran).

Jadi untuk meningkatkan produktivitas orang yang pulang sudah keburu mudik, kemudian yang kena dampak covid maka dibantulah dengan ini.

- c. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada kegiatan pengembangan ternak ruminasia potong antara lain: domba, kambing dan sapi.
- d. Badan Ketahanan Pangan pada kegiatan pangan lestari.

Anggota?

ANGGOTA KOMIS IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, coba dilihat lagi?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Yang d ya. Mohon koreksinya ya. Mungkin kalau Rp87 miliar Untuk distribusi pangan Pak. Kami sebetulnya kalau untuk pangan lestari kita sudah alokasikan. Totalnya itu ada 3461 titik. Jadi kalau kami lembaga distribusi pangan kita pindahkan, saya tidak bisa bergerak apa-apa ini di Lembaga distribusi pangan Pak. Kita tidak mengembangkan Gapoktan, Gapoktan. Justru kita memfasilitasi Gapoktan dengan langkah itu. Ini yang kita lakukan. Jadi 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama memfasilitasi Gapoktan, yang kedua adalah kita membantu biaya operasionalnya agar dia bisa menjual hasil ke toko tani. Artinya dia bisa justru ini kepada Gapoktan.

Kalau misalnya diarahkan pada 9 ribu, kemudian tapi kita harus diarahkan dirumah saja. Ini yang kita takutkan. Mohon maaf kalau ditambah menjadi kegiatan pangan lestari dan lembaga distribusi pangan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Ya mungkin bisa kita coba.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua, mohon ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Ketua mohon ijin pada huruf c yaitu rumanisia potong, disitu tercantum domba, kambing dan sapi. Mohon ditambah babi. Iya bapak juga suka makan babi. Ijin ketua, mohon ijin ini ketua, atas aspirasi Popi ini ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Bagus Adi itu yang babi sudah ada tersendiri. Tidak dipotong, jadi tidak perlu dimasukan lagi.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua, mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Point d Ketua, saya usulkan untuk menambah lumbung pangan baru 300 lumbung pangan. Jadi kalau nanti didaerah kekurangan pangan itu bisa cepat dipenuhi lumbung pangan, lumbung pangan masyarakat.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Ya setuju. Lumbung pangan masyarakat harus diperkuat.

F.PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.)

Mengisi lumbung pangan masyarakat Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Agung, Pak Kepala Badan.

Kalau kita lihat pekarangan pangan lestari itu awalnya Rp204 Miliar, kemudian dipotong menjadi Rp142. Kita tambahkan kembali 87. Kan tidak ada masalah sebetulnya. Masalahnya dimana?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Ya Pak Ketua.

Mohon ijin Pak Ketua.

Jadi untuk pekarangan pangan lestari ini sebetulnya yang kita kurangi dari volume yang menjadi 3461 semuanya sudah realisasi Pak. Jadi itu yang saya potongkan, tapi ini tidak mengurangi apa yang telah kita sepakati untuk pada saat itu kita pertahankan. Cuma saya kalau lembaga distribusi pangan ini kita hilangkan Pak, saya terus terang saya tidak bisa bergerak banyak Pak. Jadi sekarang saya tidak akan dapat barang. Karena ini sebetulnya termasuk dalam aspirasi mereka. Tapi kalau sebagian itu dialihkan untuk keperluan penguatan pada lumbung pangan ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Coba Bapak lihat. Dilihat dulu, yang dipotong apa saja coba. Bapak pegang bahan tidak? Jangan-jangan nanti seperti Dirjen PKH, nanya bahannya ada dimana. Yang dipotong mana coba?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Saya pegang Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Yang dipotong itu dimana?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Jadi nanti itu.

KETUA RAPAT:

Yang kami potong antara lain, lembaga distribusi pangan. Itu dari 84 miliar kami ambil 40 miliar. Kemudian kajian dan kebijakan ketahanan pangan kami pindahkan 25 miliar. Ini pun bukan untuk ke Dirjen yang lain, tetapi tetap ke anda juga Pak. Ini loh. Kecuali kami pindahkan ke Dirjen yang lain. Itu kan tidak layak, ini kan untuk anda juga. Tadi Pak Sekjen mengatakan, mungkin Badan Ketahanan Pangan, pada kegiatan pekarangan pangan lestari, silakan kalau mau ditambahkan apa, ditambahkan. Kan gitu saja.

Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Ya kalau saya usul lembaga distribusi pangan. Badan Ketahanan Pangan itu kegiatannya refocusingnya untuk pekarangan pangan lestari dan lembaga distribusi pangan.

KETUA RAPAT:

Anggota setuju?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Lembaga distribusi pangan ya.

Sudah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020, dan memproses revisi berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat ini. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar rincian anggaran per Eselon I hasil perhitungan ulang sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini disampaikan kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum Rapat Kerja.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih atas tanggapannya. Rancangan kesimpulan rapat ini sudah dapat disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat ini, kami persilakan Sekjen Kementan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Baik.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Saya mewakili teman-teman Eselon I, Pak Dirjen BUN, Dirjen Horti, Dirjen PKH, dan juga Kepala Badan Ketahanan Pangan mengucapkan terima kasih atas masukan, arahan, saran sehingga kegiatan ini lebih fokus dan lebih terarah dalam rangka mendukung program-program pertanian dan juga khususnya kesejahteraan petani di Indonesia. Selain itu juga kami mohon maaf, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pertemuan ini bisa segera kami proses dan kami tindaklanjuti dan juga dari pertemuan ini bisa menghasilkan yang lebih baik untuk pembangunan petani di Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Pak Sekjen, saya mohon terkait dengan aspirasi yang saya sampaikan tadi yaitu PMK RI Nomor 152/PMK/010/2019 mohon dijawab tertulis Pak Sekjen.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMANTAN:

Siap. Nanti kami koordinasikan dengan Dirjen Perkebunan dan Kementerian Keuangan.

Terima kasih Pak Bagus.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobil'alamin*, Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 14.20 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001